

Raynor Argaditya

by Raynor Argaditya Raynor Argaditya

Submission date: 08-Jun-2023 09:44AM (UTC+0700)

Submission ID: 2111447025

File name: Raynor_Argaditya_1910412035_Skripsi_1.docx (1.88M)

Word count: 19918

Character count: 134650



Judul Skripsi:

DINAMIKA ASEAN DALAM MENYELESAIKAN KRISIS POLITIK PASCA-KUDETA MILITER MYANMAR 2021

1
Tugas Akhir Skripsi ini diajukan untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Sosial

Nama : Raynor Argaditya

NIM : 1910412035



PROGRAM STUDI HUBUNGAN INTERNASIONAL

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL VETERAN JAKARTA

PERNYATAAN ORISINALITAS

Skripsi ini adalah hasil karya sendiri dan semua sumber yang dikutip maupun yang dirujuk telah saya nyatakan benar.

Nama : Raynor Argaditya

NIM : 1910412035

Tanggal : 6 Juni

¹ Bilamana di kemudian hari ditemukan ketidaksesuaian dengan persyaratan saya, maka saya bersedia dituntut dan diproses sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Jakarta, 6 Juni 2023

Penulis

Raynor Argaditya

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai civitas akademik Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Raynor Argaditya

NIM : 1910412035

Fakultas : Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Program Studi : S1 Hubungan Internasional

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta Hak Bebas Royalti Non eksklusif (*Non-exclusive Royalty Free Rights*) atas karya ilmiah saya yang berjudul:

DINAMIKA ASEAN DALAM MENYELESAIKAN KRISIS POLITIK PASCA-KUDETA MILITER MYANMAR 2021

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti ini, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*), merawat, dan mempublikasikan skripsi saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di: Jakarta

Pada tanggal: 25 Mei 2023

Yang menyatakan,



Raynor Argaditya

**DINAMIKA ASEAN DALAM MENYELESAIKAN KRISIS POLITIK PASCA-
KUDETA MILITER MYANMAR 2021**

***ASEAN DYNAMICS IN RESOLVING THE POST-2021 COUP POLITICAL CRISIS IN
MYANMAR***

Oleh:

Raynor Argaditya

1910412035

1
SKRIPSI

Untuk memenuhi salah satu syarat ujian

Guna memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional

Telah disetujui oleh Tim Pembimbing pada

Tanggal seperti tertera di bawah ini

Jakarta, 6 Juni 2023

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

1
Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag, M.Si.

Hesti Rosdiana, S.Sos, M.Si.



Program Studi Hubungan Internasional

1
Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik

Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

2023

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Raynor Argaditya

NIM : 1910412035

Program Studi : S1 Hubungan Internasional

Judul Skripsi : Dinamika ASEAN dalam Menyelesaikan Krisis Politik
Pasca-Kudeta Militer Myanmar 2021

Tel¹ah berhasil dipertahankan di hadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar sarjana pada Program Studi Hubungan Internasional, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta

Pembimbing I

Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag, M.Si.

Penguji I

Penguji II

Dr. Mansur Juned, M.Si

Wiwiek Rukmi Dwi Astuti, S.IP., M.Si.¹

Kepala Program Studi

Hubungan Internasional

Andi Kurniawan, S.Sos., M.Si

ABSTRAK

Penelitian ini membahas tentang dinamika ASEAN dalam menyelesaikan krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021 menggunakan teori regionalisme dan konsep kudeta.

⁶¹ Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif oleh John W. Creswell dengan menggunakan sumber data primer dan sekunder. Peneliti ¹² menggunakan dua teknik analisis data, yaitu analisis deskriptif dan analisis wawancara.

Dalam penelitian ini, disimpulkan bahwa ASEAN gagal karena prinsip non-interferensi yang dianut menghalangi tanggung jawab ASEAN terhadap Myanmar dan perlu memprioritaskan prinsip lain, yaitu ⁸⁰ supremasi hukum, tata kelola yang baik, prinsip demokrasi, dan pemerintahan konstitusional. Selain itu, ASEAN tetap berkomitmen untuk mendukung Myanmar dalam upayanya untuk kembali ke keadaan normal sesuai dengan keinginan rakyat Myanmar, mengingat salah satu poin yang terkandung dalam Konsensus Lima Poin (5PC) adalah menyerukan dialog yang konstruktif antara semua pihak demi meraih solusi damai.

Kata Kunci: ASEAN, Myanmar, regionalisme, kudeta, non-interferensi

ABSTRACT

This study discusses ASEAN dynamics to settle the political crisis that occurred in Myanmar after the 2021 military coup. In addition, this study uses qualitative method by focusing on data in the field. Regionalism theory is used to study regional organizational policies. The coup concept examines the impact of the coup so as to move ASEAN to be actively involved.

The research method used is a qualitative method by John W. Creswell using primary and secondary data sources. Researchers used two data analysis techniques, namely descriptive analysis and interview analysis.

In this study, it was concluded that ASEAN failed due to the adhered to non-interference principle became an obstacle to ASEAN's responsibility towards Myanmar and it was necessary to prioritize other principles, namely the rule of law, good governance, democratic principles, and constitutional government. In addition, ASEAN remains committed to supporting Myanmar in its efforts to return to normal conditions in accordance with the wishes of the people of Myanmar, bearing in mind that one of the points contained in the Five-Point Consensus (5PC) is calling for constructive dialogue between all parties in order to achieve a peaceful solution.

Keywords: ASEAN, Myanmar, coup, qualitative, non-interference

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala karunia-Nya sehingga skripsi ini berhasil diselesaikan. Judul yang dipilih dalam penelitian yang dilaksanakan sejak September 2022 ini adalah “Dinamika ASEAN dalam Menyelesaikan Krisis Politik Pasca-Kudeta Militer Myanmar 2021”.

Terima kasih penulis ucapkan kepada Bapak Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag, M.Si. dan Mba Hesti Rosdiana, S.Sos, M.Si. selaku pembimbing utama dan pembimbing pendamping yang telah mencurahkan waktu, tenaga, dan pikiran dalam membantu penulis menyelesaikan tulisan ini. Di samping itu, ucapan terima kasih juga penulis ucapkan kepada rekan-rekan sebagai berikut:

- 1) Jati Santosa dan Rini Prasetyanti sebagai ayah dan ibu kandung dari penulis, beserta Odelia Ardhani Putri sebagai kakak perempuan penulis, yang senantiasa memberikan kasih sayang, semangat, dan dukungan moral maupun materil kepada penulis.
- 2) Mas Andi Kurniawan, S.Sos, M.IP selaku Ketua Program Studi dan seluruh jajaran dosen Hubungan Internasional UPN Veteran Jakarta atas ilmu dan bantuannya selama penulis berkuliah.
- 3) Bapak Pardi, Mba Arina, Mas Febi, serta seluruh jajaran staf Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UPN Veteran Jakarta yang telah membantu penulis dalam berbagai urusan akademik dan teknis.
- 4) Bapak Laurentius Amrih Jinangkung, S.H., LL.M., Bapak Rheinhard Sinaga, Ibu Nina Kurnia Widhi, dan Bapak Ronald E. Tundang dari Kementerian Luar Negeri RI yang telah bersedia menjadi narasumber penelitian penulis.
- 5) Teman-teman HI 19 dan HI 18 atas kebersamaannya selama saya menempuh pendidikan di UPN Veteran Jakarta.

Jakarta, 6 Juni 2023

Penulis

Raynor Argaditya

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	ii
PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS	iii
PENGESAHAN SKRIPSI	v
ABSTRAK	vi
ABSTRACT	vii
KATA PENGANTAR	viii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR TABEL	xii
DAFTAR GAMBAR	xiii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I.....	14
1. PENDAHULUAN	14
1.1 LATAR BELAKANG MASALAH	14
1.2 PENELITIAN TERDAHULU.....	20
1.3 RUMUSAN MASALAH	26
1.4 TUJUAN PENELITIAN	27
1.5 MANFAAT PENELITIAN.....	27
1.6 SISTEMATIKA PENULISAN.....	27
BAB II	29
2. KONSEP DAN TEORI PENELITIAN	29

2.1 KONSEP KUDETA.....	29
2.2 REGIONALISME	32
BAB III.....	39
3. METODE PENELITIAN	39
3.1 OBJEK PENELITIAN.....	39
3.2 JENIS PENELITIAN	39
3.3 SUMBER DATA	41
3.4 TEKNIK ANALISIS DATA	42
3.5 WAKTU DAN TEMPAT PENELITIAN.....	43
BAB IV	45
4. PEMBAHASAN	45
4.1 DINAMIKA KEKUASAAN MILITER DI MYANMAR.....	45
4.2 KRISIS POLITIK DAN KEMANUSIAAN PASCA-KUDETA MYANMAR 2021	50
4.3 REAKSI REGIONAL DAN INTERNASIONAL TERHADAP KUDETA MILITER MYANMAR 2021	53
4.4 PERAN ASEAN DALAM PENYELESAIAN KRISIS POLITIK PASCA-KUDETA MILITER MYANMAR 2021	57
4.5 DINAMIKA ASEAN DALAM PENYELESAIAN KRISIS POLITIK PASCA-KUDETA MILITER MYANMAR 2021	72
BAB V.....	87
5. KESIMPULAN DAN SARAN	87
5.1 KESIMPULAN	87
5.2 SARAN	87

DAFTAR PUSTAKA 89

RIWAYAT HIDUP 99

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Waktu Penelitian	43
--	-----------

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Demonstrasi Anti-Kudeta di Mandalay, Myanmar	49
Gambar 2 KTT Khusus ASEAN pada April 2021 di Jakarta	69

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Transkrip Wawancara	102
Lampiran 2 Bukti Pemeriksaan Turnitin.....	109
Lampiran 3 Surat Riset	110
Lampiran 4 Lembar Persetujuan Sidang Skripsi.....	111
Lampiran 5 Kontrak Penulisan Skripsi	112

BAB I

1. Pendahuluan

1.1 Latar Belakang Masalah

Sebelum tahun 2021, Myanmar (sebelumnya Burma) pernah berada di bawah kekuasaan militer selama dua kali, yaitu di bawah Partai Program Sosialis Burma (*Burma Socialist Programme Party/BSPP*) yang dipimpin oleh Jenderal Ne Win (1962-1988) dan di bawah Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (*State Peace and Development Council/SPDC*, 1988-2011). Pada tanggal 1 Februari 2021, Jenderal Senior Min Aung Hlaing yang merupakan Panglima Tertinggi Tatmadaw (Angkatan Bersenjata Myanmar) melancarkan kudeta militer terhadap pemerintahan Aung San Suu Kyi yang terpilih demokratis dan memberlakukan keadaan darurat selama satu tahun.

Motivasi Min Aung Hlaing dalam melancarkan kudeta adalah dugaan kecurangan yang dilakukan oleh partai politik Aung San Suu Kyi, Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD), dalam pemilu yang diadakan pada November 2020, dimana NLD memenangkan 920 (82 persen) dari total 1.117 kursi terpilih yang diperebutkan secara nasional, sementara partai proksi Tatmadaw, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), hanya memperoleh 71 kursi (6,4 persen) dari kursi terpilih.

Kudeta ini memulihkan kekuasaan militer penuh di Myanmar setelah periode demokratisasi dan liberalisasi yang dimulai pada tahun 2011, ketika seorang mantan jenderal Angkatan Darat Myanmar, Thein Sein untuk pertama kalinya terpilih secara demokratis sebagai presiden Myanmar, melaksanakan reformasi parlementer, dan membuka Myanmar kepada investasi asing dari Amerika Serikat dan negara-negara Barat. Aung San Suu Kyi, Penasihat Negara Myanmar yang digulingkan, ditahan dan menghadapi berbagai tuduhan bermotif

politik, seperti melanggar aturan Covid-19, korupsi, dan mengimpor *walkie-talkie* secara ilegal (Goldman, 2022).

Sebelum kudeta 2021, Myanmar diperintah berdasarkan pengaturan pembagian kekuasaan antara pemerintah sipil dan militer, di bawah Konstitusi 2008, yang memastikan bahwa militer tidak pernah berada di bawah wewenang sipil dan mencadangkan 25 persen kursi parlemen, tiga portofolio menteri utama (pertahanan, dalam negeri, dan perbatasan), dan salah satu jabatan wakil presiden. Militer berharap pengaturan ini mampu mempertahankan pengaruhnya dalam politik domestik Myanmar, tetapi pemilu November 2020 membuktikan bahwa keseimbangan telah bergeser. Dalam beberapa minggu menjelang kudeta, Min Aung Hlaing menyatakan dukungannya untuk klaim kecurangan pemilu oleh USDP, namun Komisi Pemilu Myanmar (*Union Election Commission/UEC*) tidak menemukan bukti kuat untuk mendukung klaim ini.

Tatmadaw memproklamkan dirinya sebagai penjaga solidaritas, persatuan, dan kedaulatan nasional dengan ‘kewajiban dan hak’ untuk memerintah Myanmar. Kemenangan NLD dalam pemilu November 2020 berpotensi membahayakan kepentingan bisnis Tatmadaw yang cukup besar serta pengaruh politiknya. Min Aung Hlaing seharusnya pensiun pada Juli 2021 dan kudeta militer 1 Februari 2021 mampu memperpanjang kekuasaan politik dan jaringan patronasi¹nya, yang meliputi bisnis keluarga yang menguntungkan dan luas. Pemilu baru juga dianggap memudahkan Hlaing dalam meraih kepresidenan (ambisinya yang sudah lama terpendam) jika USDP berhasil memenangkan sepertiga kursi dan menghindari penuntutan di

¹ Patronasi: Pemberian penghargaan kepada individu atau perusahaan berdasarkan dukungan mereka kepada partai politik yang memerintah, dapat berupa penerimaan seseorang dalam jabatan pemerintahan.

mahkamah internasional atas perannya dalam kekejaman militer Myanmar di Negara Bagian Rakhine, Kachin, dan Shan (BBC, 2021).

Jutaan orang di seluruh negeri Myanmar turun ke jalan untuk menentang kekuasaan junta militer² yang baru, Dewan Administrasi Negara (*State Administration Council/SAC*), yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing. Ketika demonstrasi damai pro-demokrasi berjalan (metode yang paling terkemuka adalah memukul panci (*pot-banging*) dan salam tiga jari (*three-finger salute*)), aparat junta membalasnya dengan cara kekerasan, seperti menembakkan peluru tajam pada para pengunjung rasa yang tidak bersenjata. Pada Juni 2021, setidaknya 887 orang diperkirakan telah tewas dan lebih dari 6.000 ditangkap oleh junta militer sejak kudeta.

Pada April 2021, para anggota parlemen Myanmar yang digulingkan dan perwakilan beberapa partai politik etnis membentuk pemerintahan paralel, Pemerintah Persatuan Nasional (*National Unity Government/NUG*) untuk menyinkronkan perlawanan terhadap kudeta militer Tatmadaw dan menciptakan titik temu untuk memperoleh dukungan dan pengakuan masyarakat internasional sebagai pemerintahan sah Myanmar. Pada bulan yang sama, pemerintahan SAC menetapkan NUG sebagai organisasi teroris dan mengumumkan bahwa 24 menteri kabinet dan wakil menteri NUG telah didakwa dengan tuduhan makar dan perkumpulan ilegal (*The Straits Times*, 2021).

Kudeta militer 2021 membawa gejolak ekonomi dan menghapuskan pencapaian sederhana dalam pengurangan kemiskinan yang dicapai selama satu dekade terakhir di Myanmar. Perekonomian nasional menyusut hampir 20 persen pada tahun 2021. Selain itu, sistem perawatan kesehatan runtuh di tengah pandemi Covid-19. Jutaan orang menghadapi kelaparan dan puluhan ribu telah melarikan diri ke daerah

² Junta militer: Dewan pemerintahan yang didirikan dan dikuasai oleh militer

lain di Myanmar atau melintasi perbatasan ke India dan Thailand. Bahkan (Kurlantzick, 2021) mengatakan bahwa Myanmar telah menjadi negara gagal (*failed state*) akibat kudeta.

Salah satu masalah utama yang dihadapi perekonomian Myanmar adalah devaluasi mata uang nasionalnya, kyat. Kyat telah kehilangan sekitar setengah nilainya. Devaluasi ini meningkatkan inflasi hingga 16% pada tahun 2022, menurunkan kemampuan warga untuk membeli barang dan jasa. Akibatnya, daya beli sangat berkurang dan banyak warga berjuang bahkan untuk membeli kebutuhan pokok. Program Pangan Dunia (WFP) memperkirakan bahwa 14,4 juta orang, lebih dari 25% populasi, menghadapi kerawanan pangan. Devaluasi juga merugikan bisnis, membuat barang impor dan bahan baku lebih mahal, serta menyebabkan penurunan aktivitas ekonomi. Selain itu, depresiasi telah mempersulit Myanmar untuk menarik investasi asing, karena ketidakstabilan mata uang menghalangi rasa percaya investor. Situasi ekonomi Myanmar secara keseluruhan menjadi semakin mengerikan karena devaluasi kyat dan kemungkinan akan membutuhkan waktu dan upaya yang signifikan untuk memulihkan stabilitas ekonomi.

Masalah besar lainnya adalah *brain drain* penduduk usia kerja, dengan ribuan orang diperkirakan meninggalkan negara itu setiap bulan. Sejak kudeta, banyak profesional muda dan pekerja terampil yang tersisa telah dipenjara dan dibunuh. Hal ini mengakibatkan kekurangan tenaga kerja terampil di Myanmar, yang semakin menghambat pertumbuhan ekonomi. Selain itu, kerusuhan sipil yang sedang berlangsung telah mempersulit bisnis untuk beroperasi, sehingga menyebabkan hilangnya pekerjaan dan menurunnya aktivitas ekonomi.

Karena sifat perekonomian Myanmar yang didominasi oleh militer dan kroni-kroninya, sanksi internasional telah mempersulitnya untuk berdagang dengan negara lain dan semakin melemahkan

ekonominya. Sanksi internasional telah ditargetkan pada junta militer dan bisnisnya serta individu dan perusahaan yang mendukung rezim tersebut. Selain sanksi ekonomi yang dijatuhkan oleh AS dan UE, krisis politik dan ¹⁰² hak asasi manusia yang sedang berlangsung di Myanmar juga menyebabkan banyak bisnis internasional hengkang. Banyak perusahaan multinasional terkemuka telah meninggalkan negara tersebut, termasuk ⁷⁵ *Telenor, Kirin, Woodside Petroleum, Chevron, TotalEnergies, Voltalia*, dan *British American Tobacco*, karena kekhawatiran atas peran militer dalam pemerintahan, pelanggaran hak asasi manusia, dan situasi politik yang tidak stabil.

Kepergian bisnis internasional ini telah menyebabkan hilangnya pekerjaan dan pendapatan yang signifikan bagi masyarakat Myanmar dan penurunan aktivitas ekonomi secara keseluruhan. Ini juga semakin membatasi akses negara ke investasi dan teknologi asing, menghambat kemampuannya untuk mengembangkan dan memodernisasi ekonominya. Degradasi infrastruktur yang kritis, seperti energi dan komunikasi, telah membuat bisnis tidak dapat beroperasi dengan andal. Selain itu, sanksi dan penghentian bisnis juga telah menurunkan cadangan devisa negara dan meningkatkan inflasi, sehingga semakin mempersulit negara untuk mengimpor barang dan jasa serta melunasi utangnya.

Perekonomian Myanmar terpuruk sejak kudeta militer yang gagal pada Februari 2021. Ketidakmampuan dan salah urus junta menyebabkan devaluasi mata uang, *brain drain* penduduk usia kerja, dan sanksi ekonomi. Selama junta mengelola ekonomi, kecil kemungkinannya untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional Myanmar. ²⁴ Oleh karena itu, sangat penting bagi masyarakat internasional untuk terus menekan junta untuk memulihkan demokrasi

dan mengizinkan pemerintahan sipil yang memenuhi syarat untuk mengatasi masalah ekonomi negara (Byrd, 2023).³

Myanmar menyetujui \$1,45 miliar dalam investasi asing langsung selama tujuh bulan pertama tahun fiskal 2022-2023, sebagian besar dari Singapura, saluran untuk uang asing ke Myanmar dan Tiongkok, menurut data resmi. Pemerintahan SAC telah berhenti mengungkapkan proyek yang telah disetujui sejak kudeta, serta menghapus atau membatasi akses ke sejumlah daftar perusahaan. Perusahaan energi Tiongkok termasuk di antara sedikit perusahaan asing yang tampaknya bersedia melakukan investasi baru di negara itu, berpartisipasi dalam rencana pemerintah SAC untuk memperluas tenaga surya.

Namun, mengingat skala masalah yang menimpa industri tersebut, para ahli mengatakan proyek tersebut tidak mungkin mengatasi akar penyebab pemadaman listrik kronis di negara itu, yang meliputi runtuhnya tata kelola yang stabil, konflik, dan volatilitas mata uang. “Sistem energi Myanmar berantakan dan tidak ada rencana untuk memperbaikinya. Tidak hari ini, tidak dalam lima tahun,” kata Guillaume de Langre, seorang ahli energi yang pernah menjadi penasihat pemerintah Myanmar, kepada Al Jazeera. “Junta berbohong kepada para investor, sementara kekuatan perlawanan lokal meningkatkan serangan canggih mereka pada titik-titik kritis jaringan listrik.”

Bahkan jika jajak pendapat tetap berjalan, mereka tidak mungkin berbuat banyak untuk meyakinkan investor. “‘Pemilu’ tidak siap untuk menginspirasi kepercayaan investor yang nyata di Myanmar,

³ Byrd, M. (2023, 1 Februari). Myanmar Economy in Tailspin, 2 Years after the Military Coup. Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies. <https://dkiapcss.edu/myanmar-economy-in-tailspin-2-years-after-the-military-coup/>

setidaknya untuk jangka pendek,” kata seorang sumber di Yangon yang memiliki akses ke militer dan menolak disebutkan namanya karena takut akan pembalasan. Dia berharap waktu pemrosesan bisnis akan tetap lebih lambat sekarang karena keadaan darurat telah diperpanjang. “Tindakan keras pada periode pasca-pemilu akan meningkat dalam upaya untuk menggambarkan perlawanan sebagai hambatan untuk kembali ke ‘bisnis seperti biasa.’” Tapi tidak seperti perusahaan multinasional, pebisnis, pemilik toko, dan petani Myanmar tidak punya tempat tujuan.⁴

1.2 Penelitian Terdahulu

Banyak penelitian terdahulu yang telah membahas dan mengupas tentang krisis politik dan kemanusiaan pasca-kudeta Myanmar 2021 dan upaya ASEAN dalam menyelesaikannya. Beberapa penelitian terdahulu dapat diklasifikasikan ke dalam dua kelompok, yakni kelompok pertama yang membahas krisis politik pasca-kudeta Myanmar 2021 dan kelompok kedua yang membahas upaya ASEAN dalam penyelesaiannya.

Pada kelompok pertama yang membahas tentang krisis politik pasca-kudeta Myanmar 2021, Hendra Manurung dalam tulisannya yang berjudul *Myanmar Political Instability: A Threat to Southeast Asia Stability* yang dipublikasikan pada tahun 2021 di Jurnal Asia Pacific Studies membahas bahwa 11 hari setelah kudeta terjadi, ketua junta militer Myanmar yang baru (*State Administration Council (SAC)*), Min Aung Hlaing menyerukan agar publik Myanmar bermitra dengan SAC

⁴ Chau, T. & Oo, D. (2023, 2 Februari). ‘Riding a rollercoaster’ in Myanmar’s post-coup economy. Aljazeera. <https://www.aljazeera.com/news/2023/2/2/riding-a-rollercoaster-in-myanmars-post-coup-economy>

dan Tatmadaw demi memenuhi tuntutan mereka untuk demokrasi yang lebih besar (Manurung, 2021).

Osbin Samosir dalam tulisannya berjudul ⁴¹ *Why Indonesia's Political Attitude not Strong in Myanmar's Military Coup? Regional Political Studies for Elections and Democracy* yang dipublikasikan pada tahun 2022 di jurnal *Canadian Social Science* membahas bahwa para tokoh militer Myanmar ingin terlibat dalam politik karena mereka akan pensiun, termasuk Komandan Angkatan Darat yang seharusnya pensiun pada Mei 2021. Akan tetapi, karena kalah dalam pemilu, ⁸⁹ tidak ada cara lain yang bisa mereka lakukan selain menggulingkan pemerintahan yang sah (Samosir, 2022).

Yongwook Ryu, Bernard Minn, dan Myat Myat Mon dalam tulisan mereka yang berjudul ⁷ *The Military Coup in Myanmar: Time to Prioritise ASEAN Centrality and Communal Values* yang dipublikasikan pada tahun 2021 di laman *ISEAS-Yusof Ishak Institute* membahas bahwa kudeta militer Myanmar 2021 menimbulkan kesan dejavu yang mengingatkan pada kudeta tahun 1988 karena berkonsep serupa, yakni kemenangan telak NLD dalam pemilu, penolakan militer untuk menerima hasil pemilu, demonstrasi pro-demokrasi yang meluas, dan respons brutal Tatmadaw (Ryu et al, 2021).

Ye Myo Hein dalam tulisannya berjudul ⁸⁴ *The Root Causes of Myanmar's Coup Go Deeper* yang dipublikasikan pada tahun 2022 di laman *Wilson Center* membahas bahwa terdapat lima penyebab struktural kudeta, yaitu (1) reformasi politik yang sebenarnya dimaksudkan untuk menciptakan rezim hibrida yang meleburkan unsur-unsur otoritarianisme dan demokrasi; (2) Konstitusi 2008 memuat beberapa ketentuan yang memastikan “*domain* kekuasaan yang dilindungi” untuk Tatmadaw karena wewenangnya atas tiga kementerian, yaitu pertahanan, dalam negeri, dan urusan perbatasan; (3) tanpa berfungsinya negara dan adanya konsensus tentang identitas

nasional, konsolidasi demokrasi yang berhasil pasti tidak mungkin; (4) arus liberalisasi politik membuka ruang yang aman bagi bangkitnya gerakan nasionalis Buddha agresif yang dipimpin oleh para biksu garis keras; dan (5) kegagalan pemerintahan NLD dalam memajukan demokrasi dan kebebasan mendasar yang menyebabkan Myanmar mengalami kemunduran demokrasi (*democratic backsliding*) (Hein, 2022).

⁴⁵ *Centre for Strategic and International Studies* (CSIS) dalam *policy paper*-nya yang berjudul ¹³ *Seeking Strategic Options for Myanmar: Reviewing Five-Point Consensus and Anticipating the Future of Democracy in Myanmar* yang dipublikasikan pada tahun 2022 membahas bahwa peluang pertumbuhan ekonomi Myanmar sirna karena gejolak politik pasca-kudeta militer 2021. Selain itu, Myanmar terus terjerumus ke dalam krisis kemanusiaan yang lebih luas dengan penindasan politik junta militer yang semakin parah dan mengerikan (CSIS, 2022).

⁷ Anna S. King dalam tulisannya berjudul *Myanmar's Coup d'état and the Struggle for Federal Democracy and Inclusive Government* yang dipublikasikan pada tahun 2022 di jurnal *Religions* membahas bahwa kudeta militer Myanmar 2021 memulihkan status istimewa Tatmadaw dalam kehidupan publik dan sosial Myanmar, karena Tatmadaw menganggap diri mereka sebagai penjamin tiga 'tujuan nasional' bangsa Myanmar; persatuan, stabilitas, dan kedaulatan (King, 2022).

Siti Ghina Fauziah dan Made Fitri Maya Padmi dalam tulisannya berjudul *The Myanmar Military Coup in 2021 and the Future of Democracy* yang dipublikasikan pada tahun 2022 di ⁷⁹ jurnal *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)* membahas bahwa setelah satu tahun berlalu, kudeta militer Myanmar 1 Februari 2021 tetap berjalan. Pernyataan pemerintahan SAC bahwa

pihaknya akan mengadakan pemilu ulang dan mengembalikan kekuasaan ke tangan sipil tidak direalisasikan. Hal ini menggambarkan bahwa masa depan demokrasi Myanmar masih sangat jauh, bahkan tidak lagi stagnan tetapi bergerak mundur karena kudeta militer dan penahanan para aktivis masyarakat sipil. Masa depan demokrasi Myanmar pun suram dan kemungkinan besar sistem politik otoriter negara Asia Tenggara tersebut akan terus berlanjut dan bertahan (Fauziah et al, 2022).

Ye Myo Hein dalam tulisannya yang berjudul ¹³ *One Year On: The Momentum of Myanmar's Armed Rebellion* yang dipublikasikan pada tahun 2022 di laman *Wilson Center* membahas bahwa selama berlangsungnya gejolak politik Myanmar pasca-kudeta 2021, berbagai aktor keamanan baru muncul dan beberapa di antaranya dengan cepat dilembagakan, sehingga menimbulkan tantangan krusial bagi pemerintah SAC yang perlahan-lahan terbebani. Aktor keamanan non-negara yang sudah ada sejak lama, seperti organisasi bersenjata etnis (EAO), juga telah menyesuaikan diri dengan situasi yang berkembang, dengan beberapa menggunakan pertempuran, yang lain berjuang untuk memosisikan diri, dan beberapa memanfaatkan kekacauan untuk memajukan kepentingan dan tujuan masing-masing (Hein, 2022).

Hnin Mya Thida dalam tulisannya yang berjudul ⁴⁰ *People's Perception of the Role of Foreign Power in Myanmar: A Case Study of the 2021 Military Coup* yang dipublikasikan pada tahun 2021 di jurnal *Foreign Policy Review* membahas bahwa demi membuktikan kesediaan mereka untuk menolak kekuasaan junta militer Myanmar yang baru, SAC, gerakan pembangkangan sipil (CDM) dimulai sebagai kampanye daring oleh para profesional Myanmar, misalnya pekerja medis dan perawatan kesehatan. Selain pegawai pemerintah dan perusahaan, rakyat jelata juga ikut bekerja sama dengan CDM dalam hal memboikot produk dan jasa dari bisnis-bisnis milik militer, berhenti memasang

iklan di surat kabar milik negara, dan tidak membeli surat kabar negara di mana militer mengiklankan kebijakan mereka dan mencetak berita palsu untuk dikonsumsi publik Myanmar dan masyarakat internasional (Thida, 2021).

K. M. Seethi dalam tulisannya berjudul ¹¹ *Military coup in Myanmar: 'Garrison State' back to dismantle democracy* yang dipublikasikan pada tahun 2021 di jurnal *Global South Colloquy* membahas bahwa kudeta militer 2021 dipercaya secara luas sebagai akibat dari keserakahan politik pribadi Min Aung Hlaing, yang disoroti karena pembersihan etnis terhadap minoritas Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Ada kecaman internasional yang luas atas kekejaman militer terhadap Rohingya dan bahkan pembatasan perjalanan yang dikenakan pada Min Aung Hlaing oleh Pemerintah Amerika Serikat karena keterlibatan langsungnya dalam pembersihan etnis (Seethi, 2021).

Congressional Research Service dalam tulisannya berjudul *Coup in Burma: Implications for Congress* yang dipublikasikan pada tahun 2021 membahas bahwa penggunaan kekuatan mematikan oleh SAC terhadap para pengunjuk rasa anti-kudeta tersebar luas ke seluruh negeri. Menurut satu organisasi kemanusiaan, lebih dari 40 dari mereka yang tewas pada 20 April 2021 adalah anak-anak. Para perwira militer yang setia pada SAC juga diduga terlibat dalam penjarahan dan perusakan properti sipil. Pada pertengahan Maret 2021, Program Pangan Dunia (WFP) memperingatkan bahwa dampak krisis politik pasca-kudeta 2021 pada rantai pasokan makanan dan pasar mulai memengaruhi populasi termiskin Myanmar (*Congressional Research Service*, 2021).

Andrea Passeri dalam tulisannya yang berjudul ⁷¹ *The Domestic and International Implications of Myanmar's 2021 Military Coup* yang dipublikasikan pada tahun 2021 di *IKMAS Working Paper Series*

membahas bahwa krisis politik pasca-kudeta Myanmar 2021 bisa digambarkan sebagai konfrontasi multidimensi pada tiga ruang yang berbeda: jalanan di kota-kota besar dan daerah-daerah yang dihuni etnis minoritas, di mana kedua belah pihak setiap hari bentrok dengan kekerasan yang meningkat; lingkup daring di mana *netizen* kedua belah pihak bersaing dengan narasi dan operasi propaganda yang berbeda; dan lingkup internasional, dimana kedua pihak sama-sama berjuang untuk mendapatkan pengakuan dan dukungan diplomatik internasional (Passeri, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu kelompok pertama yang sudah dijabarkan, tidak dijelaskan mengapa junta militer Myanmar yang baru yang dipimpin oleh Jenderal Senior Min Aung Hlaing, Dewan Administrasi Negara (SAC), berkeras pendirian dan menolak untuk menuruti permintaan ASEAN agar memenuhi aspirasi publik Myanmar untuk demokrasi dan kebebasan mendasar yang lebih besar. Penelitian penulis akan membahas mengenai hubungan antara Myanmar dengan ASEAN secara keseluruhan dalam kaitannya dengan krisis politik domestik yang terjadi pasca-kudeta militer Myanmar 2021.

Pada kelompok kedua tentang upaya ASEAN dalam menyelesaikan krisis politik pasca-kudeta Myanmar 2021, Rizki Roza dalam tulisannya yang berjudul *Military Coup in Myanmar: A Test for ASEAN* yang dipublikasikan pada tahun 2021 dalam Info Singkat DPR membahas bahwa masyarakat internasional harus mempertimbangkan upaya ASEAN dalam merangkul junta militer Myanmar. ASEAN menyambut bergabungnya Myanmar pada tahun 1997 sesuai dengan norma konsultasi dan konsensus, serta ide untuk memandang sesama anggota ASEAN layaknya anggota keluarga sendiri, meskipun prosesnya tidak harmonis dan menemui berbagai kendala (Roza, 2021).

Harsh Mahaseth dan Aryan Tulsyan dalam tulisannya berjudul *The Myanmar Coup and The Role of ASEAN* yang dipublikasikan pada

tahun 2022 di jurnal *SSRN* membahas bahwa strategi ASEAN mengalami ketidakjelasan karena tetap lebih bersedia untuk menciptakan posisi bersatu melawan tekanan pihak eksternal daripada merumuskan kebijakan tunggal berkenaan dengan Myanmar. Akibatnya, demokrasi tidak dapat dipaksakan untuk terwujud di Myanmar (Mahaseth et al, 2022).

Charles Dunst dalam tulisannya berjudul *The Myanmar Coup as an ASEAN Inflection Point* yang dipublikasikan pada tahun 2021 di jurnal *Journal of Indo-Pacific Affairs* membahas bahwa ASEAN menolak untuk membuat pernyataan bersama dalam kaitannya dengan kudeta militer Myanmar 2021 karena beberapa negara anggotanya mengalami *democratic backsliding* dalam beberapa tahun terakhir. Contohnya adalah Thailand yang mengalami kudeta militernya sendiri oleh Jenderal Prayuth Chan-ocha pada tahun 2014 dan Kamboja di bawah Perdana Menteri Hun Sen yang memerintah dengan tangan besi selama lebih dari tiga dekade dan menjadi pemimpin non-monarki terlama di dunia (Dunst, 2021).

Berdasarkan penelitian terdahulu kelompok kedua yang telah dijabarkan, tidak dijelaskan mengapa ASEAN tidak berhasil dalam mendorong pihak junta militer Myanmar agar lebih terbuka dan bersedia untuk melakukan perundingan dengan oposisi pro-demokrasi negara tersebut. Penelitian penulis akan membahas mengenai upaya dan kebijakan ASEAN dalam menghadapi dan melunakkan junta militer Myanmar.

⁴⁷ **1.3 Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah dan penelitian terdahulu yang telah dikemukakan sebelumnya, maka rumusan masalah yang tepat untuk mengkaji permasalahan ini yaitu sebagai berikut.

Mengapa ASEAN gagal dalam menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan Myanmar pasca-kudeta 2021?

17 1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah yang telah dijelaskan di atas, dapat disimpulkan bahwa tujuan penelitian adalah sebagai berikut:

1. Menelaah peran ASEAN dalam menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan Myanmar pasca-kudeta 2021.
2. Memahami kegagalan ASEAN dalam menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan Myanmar pasca-kudeta 2021.

26 1.5 Manfaat Penelitian

1.5.1 Manfaat Praktis

Manfaat praktis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah sebagai referensi untuk generasi berikutnya, peneliti, serta pengkaji ASEAN.

65 1.5.2 Manfaat Akademis

Manfaat akademis yang dapat diambil dari penelitian ini adalah memberikan pemahaman yang komprehensif bagi generasi berikutnya mengenai fenomena kudeta dan regionalisme.

28 1.6 Sistematika Penulisan

Penulisan dalam proposal ini terdiri atas tiga bab di antaranya sebagai berikut.

- **Bab I: Pendahuluan**

Di Bab I, penulis membahas tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.

- **Bab II: Konsep dan Teori Penelitian**

Di Bab II, penulis membahas tentang konsep kudeta dan teori regionalisme.

- **Bab III: Metode Penelitian**

Di Bab III, penulis membahas tentang metode yang akan digunakan dalam penelitian penulis.

- **Bab IV: Pembahasan**

Di Bab IV, penulis membahas tentang dinamika kekuasaan militer di Myanmar, krisis politik dan kemanusiaan pasca-kudeta Myanmar 2021, reaksi regional dan internasional terhadap kudeta militer Myanmar 2021, peran ASEAN dalam penyelesaian krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021, serta kegagalan ASEAN dalam penyelesaian krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021.

- **Bab V: Kesimpulan dan Saran**

Di Bab V, penulis membahas tentang kesimpulan, saran praktis, dan saran akademis untuk penelitian ini.

BAB II

2. Konsep dan Teori Penelitian

2.1 Konsep Kudeta

Menurut (Powell et al, 2011), definisi kudeta adalah “upaya ilegal dan terbuka oleh militer atau elite lain dalam aparaturnegara untuk menggulingkan eksekutif yang sedang menjabat.” Dengan demikian, menurut definisi ini, hanya upaya untuk menggulingkan eksekutif yang sedang menjabat dapat dianggap sebagai kudeta. Definisi tersebut juga memungkinkan terjadinya kudeta yang tidak didalangi oleh militer (yang dapat disebut sebagai kudeta militer), tetapi dilakukan oleh elite mana pun yang merupakan bagian dari hierarki negara. Mampu atau tidaknya dalang kudeta untuk mempertahankan kekuasaan mereka setidaknya selama tujuh hari sering digunakan untuk membedakan kudeta yang berhasil dan yang gagal.

Dengan berakhirnya absolutisme dan penetapan prinsip kedaulatan rakyat di abad ke-17, yang memisahkan penguasa dari negara, konsep kudeta berubah menjadi seperti yang dikenal sekarang (Bartelson, 1997). Salah satu definisi klasik dikemukakan oleh Luttwak yang mendefinisikan kudeta sebagai “penyusupan segmen kecil tapi kritis dari aparaturnegara yang digunakan untuk menggulingkan pemerintah dari kendali yang tersisa” (Luttwak, 1969: 12).

Kudeta pada dasarnya bukanlah konsep yang diperdebatkan seperti halnya demokrasi atau populisme (Gallie, 1956; Mudde, 2004). Meskipun terdapat ketidaksepakatan, ada konsensus akademis yang relatif luas tentang apa yang dimaksud dengan kudeta. Namun, istilah tersebut banyak digunakan di luar akademisi dan kontroversial karena sarat politik dan memiliki implikasi normatif dan praktis. Amerika Serikat pasti akan menanggukkan program bantuan asing jika negara penerima mengalami kudeta dan Uni Eropa (UE) menjunjung ketentuan serupa (Marinov dan Goemans, 2014: 805). Selain itu, seorang kepala

negara yang terancam kekuasaannya memiliki kecenderungan untuk menggolongkan lawannya sebagai pelaku kudeta, sementara pihak oposisi ingin menyamar sebagai pejuang kebebasan dan demokrasi untuk menentang kepala negara yang berpikiran otoriter atau tidak demokratis. Demikian pula, pelaku kudeta sering mencoba untuk membenarkan tindakan mereka sebagai “revolusi”, serta mengakui diri mereka sebagai “gerakan” (Wardlaw, 1989).

Terjadinya sebuah kudeta hampir tak terhindarkan berkaitan dengan perdebatan sengit tentang konsekuensinya bagi perkembangan politik masa depan di negara masing-masing. Salah satu contoh kudeta di masa modern adalah kudeta militer Mesir yang dipimpin oleh Jenderal Abdel Fattah el-Sisi yang menggulingkan presiden pertama yang terpilih secara demokratis pasca-Musim Semi Arab, Mohamed Morsi, pada tahun 2013. Banyak pengamat setuju bahwa kudeta tersebut secara mendasar mengubah haluan perkembangan politik Mesir. Dengan demikian, tidak mengherankan bahwa para ilmuwan politik dan ekonom pada tingkat yang lebih rendah sangat tertarik dalam mengkaji penyebab dan dampak kudeta dan telah mempelajarinya selama beberapa dekade.

Selain kekacauan politik yang mereka timbulkan, kudeta juga memiliki konsekuensi negatif bagi pertumbuhan ekonomi dan investasi. Hal ini pertama kali ditunjukkan secara empiris oleh (Barro, 1991). (Levine et al, 1992) mengonfirmasi dampak buruk kudeta terhadap investasi, sementara (Sala-iMartin, 1997) menguatkan dampak buruknya terhadap pertumbuhan ekonomi. Menurut (Alesina et al, 1996), kudeta tidak hanya mengurangi tingkat pertumbuhan ekonomi, tetapi juga mungkin disebabkan oleh situasi ekonomi yang buruk di suatu negara. (Leon, 2014) menunjukkan bahwa kudeta, khususnya yang berhasil, menyebabkan peningkatan pengeluaran dalam sektor

pertahanan. Kudeta yang berhasil mengarah pada institusi demokrasi yang lebih buruk dan kekerasan yang lebih parah.

Akibat kudeta militer 2021, pertumbuhan dan produktivitas faktor-faktor produksi (modal manusia dan fisik) yang menjadi tulang punggung negara Myanmar berkurang, sehingga mengurangi²⁷ pengembalian investasi atas modal ekonomi. Lebih jauh, efek destruktif dari kudeta militer menaikkan tingkat depresiasi modal di negara Asia Tenggara tersebut.

Banyak perusahaan²⁷ mengalami penurunan penjualan, kekurangan arus kas, dan kesulitan dalam mengakses layanan perbankan dan internet, yang merugikan tenaga kerja dalam perekonomian di mana dampak gabungan dari kudeta dan pandemi Covid-19 merugikan Myanmar sekitar 1,6 juta pekerjaan pada tahun 2021. Sektor konstruksi, garmen, pariwisata, dan perhotelan mengalami kehilangan pekerjaan dari tahun ke tahun⁸⁷ masing-masing sebesar 31 persen, 27 persen, dan 30 persen.

Pada September 2021, perekonomian Myanmar mengalami kontraksi sebesar 18 persen dan sejak itu proyeksi pertumbuhannya hanya sekitar 1 persen. Krisis politik pasca-kudeta 2021 menghancurkan iklim bisnis dan menurunkan tingkat investasi langsung asing di Myanmar. Tidak hanya pendanaan proyek infrastruktur dari negara-negara donor, seperti bantuan pembangunan resmi dari Jepang yang dipertaruhkan; banyak bisnis internasional, seperti perusahaan telekomunikasi Telenor asal Norwegia, mempertimbangkan kembali investasi mereka di Myanmar (Banerjee, 2022).

Terlepas dari gejolak politik Myanmar, proyek-proyek *Belt and Road Initiative* (BRI) Tiongkok tetap berjalan dengan jaminan junta militer penguasa yang baru, yaitu *State Administration Council* (SAC). Pada Februari 2021, *China Power* memulai pembangunan proyek

pembangkit listrik siklus gabungan gas-uap Kyaukpyu. Proyek senilai \$180 juta ini akan berkontribusi pada pengoperasian pelabuhan laut dalam dan SEZ. Selain itu, junta mengganti komite KEK Kyaukpyu dengan anggota baru untuk melaksanakan proyeknya. Pada Maret 2021, proyek pembangkit listrik tenaga gas alam Mee Lin Gyaing dari Grup Investasi Energi Provinsi Yunnan di wilayah Ayeyarwady, senilai \$2,5 miliar, disetujui oleh pemerintah SAC. Proyek BRI lainnya sedang berjalan dalam persiapan (Chan, 2021).

2.2 Regionalisme

Teori yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah regionalisme. (Winters, 1999) mendefinisikan regionalisme sebagai 'setiap kebijakan yang dirancang untuk mengurangi hambatan perdagangan antara beberapa negara, terlepas dari apakah negara-negara tersebut benar-benar berdekatan atau bahkan dekat satu sama lain.' Kecenderungan untuk menyebut kawasan sebagai 'blok perdagangan' terlalu menekankan aspek perdagangan dari regionalisme dan kata 'blok' menyiratkan sifat defensif (Cable et al, 1994). Karena kurang lebih baik, sebagian besar penulis mendefinisikan suatu kawasan dalam hal kedekatan geografis (Mansfield et al, 1997). (Cohen, 1997), di sisi lain, menekankan mata uang bersama sebagai dasar regionalisme. Regionalisme dapat merujuk secara longgar pada semakin banyaknya hubungan integrasi dengan intensitas yang berbeda-beda antara setiap negara-bangsa (Dent, 1997), tetapi paling baik dicontohkan dengan meningkatnya jumlah perjanjian integrasi regional (RIA) baru di seluruh dunia selama tahun 1990-an (Atkinson, 1999).

Upaya yang lebih baru untuk mencapai integrasi regional dimulai pada tahun 1960-an, ketika banyak negara berkembang

mencoba mengambil keuntungan dari keunggulan komparatif dan pasar yang lebih besar sambil melindungi pasar mereka dari perdagangan global melalui industrialisasi substitusi impor (ISI). Bentuk semi-autarki dari perdagangan bebas ini didasarkan pada pengurangan tarif yang terbatas pada sejumlah kecil produk, tingkat perlindungan yang tinggi terhadap negara ketiga, dan menawarkan sedikit ruang untuk keuntungan efisiensi melalui eksploitasi skala ekonomi (Laird, 1997). Ketika strategi ISI dapat dilihat dalam konteks pembagian dunia era Perang Dingin, gagasan ketergantungan Dunia Ketiga, dan kekhawatiran akan kebangkitan sentimen nasionalis, gelombang kedua menghasilkan lapisan kompleksitas tambahan pada fenomena regionalisme.

Akibatnya, 'regionalisme baru' ini (Mansfield et al, 2000) mendapat perhatian baru dari kalangan akademis. Meskipun ada banyak dan beragam literatur, 'bagaimana dan mengapa' tetap kurang dipahami (Hettne et al, 2000). Perdebatan berpusat pada keuntungan kesejahteraan dan implikasi regionalisme (terutama konsekuensi multilateralisme), dalam situasi apa suatu negara terlibat dalam Perjanjian Integrasi Regional (RIA), serta mengapa dan kapan integrasi mengambil bentuknya.

⁶⁹Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara (*Association of Southeast Asian Nations/ASEAN*), yang ⁴⁸terdiri dari 10 negara anggota, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, dan Vietnam, ²⁶didirikan di Bangkok, Thailand pada tanggal 8 Agustus 1967 dan pada dasarnya merupakan tanggapan terhadap ancaman internal dan eksternal lingkungannya. Konteks lingkungan saat itu adalah terjadinya Perang Dingin yang dimulai dari tahun 1947 hingga ⁹²sekitar tahun 1989 setelah berakhirnya Perang Dunia II, dimana hanya dua negara, yaitu Amerika Serikat dan Uni Soviet, yang memiliki pengaruh ekonomi, politik, dan militer global yang luas,

sehingga “persaingan adikuasa” menjadi ciri utama politik global kala itu.

Faktor identitas regional tidak dapat dipisahkan dari visi membangun ASEAN mengingat perbedaan sejarah dan budaya negara-negara ASEAN, selain nasib bersama yang pernah dijajah oleh bangsa Eropa, karena dapat memperkuat organisasi yang baru terbentuk saat itu.⁶³ Hampir semua negara di Asia Tenggara pernah dijajah oleh bangsa Eropa, kecuali Thailand. Indonesia dijajah oleh Belanda, Malaysia dijajah oleh Inggris, Singapura dijajah oleh Inggris, Filipina dijajah oleh Spanyol, Brunei Darussalam dijajah oleh Inggris, Vietnam dijajah oleh Prancis, Kamboja dijajah oleh Prancis, Myanmar (Burma) dijajah oleh Inggris, dan Laos dijajah oleh Prancis. Mereka⁶⁸ mendasari terbentuknya ASEAN atas rasa solidaritas dan perasaan yang sama karena bangsa Eropa menjajahnya. Dengan ditandatanganinya Deklarasi Bangkok, lahirlah persatuan bangsa-bangsa Asia Tenggara di bawah bendera ASEAN.

Tanggapan ASEAN terhadap lingkungan spesifiknya tercermin dengan sangat jelas dalam tujuan utama Deklarasi Bangkok, yaitu memulihkan dan menyelaraskan kembali hubungan intra-regional dan menyusun struktur tatanan baru Asia Tenggara berdasarkan prinsip-prinsip saling menghormati dan hidup berdampingan secara damai, apa pun kondisi sistem sosial dan politik negara-negara anggotanya.⁴⁶ Melalui struktur baru ini, ASEAN ingin meningkatkan kerja sama ekonomi dan sosial budaya: “mempercepat pembangunan ekonomi, sosial, dan budaya di kawasan melalui upaya bersama dalam semangat kesetaraan dan kemitraan guna memperkuat landasan bagi kesejahteraan dan perdamaian masyarakat bangsa-bangsa Asia Tenggara.” (Deklarasi Bangkok, 1967).³⁰

Meskipun dinyatakan bahwa tujuan ekonomi lebih menonjol daripada “memperkuat perdamaian dan stabilitas kawasan”, namun para

pendiri ASEAN yakin bahwa ada ikatan yang kuat antara pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia, dan kerja sama di satu sisi dan perdamaian dan stabilitas di sisi lain. Premis dasar ASEAN ini telah dirumuskan sebagai sikap terpadu dalam ekonomi serta kerja sama politik-keamanan dan hal ini secara khusus tercermin dalam sebagian besar dokumen ASEAN seperti Deklarasi Bangkok, Deklarasi Zona Perdamaian, Kebebasan, dan Netralitas (ZOPFAN), dan Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC).

Dari tahun 1976 hingga 1989, koherensi dan *raison d'être* ASEAN dengan cepat bergeser ke perkembangan di semenanjung Indocina. Invasi dan pendudukan Vietnam ke Kamboja pada tahun 1979 selama sepuluh tahun merupakan katalitik dalam mengubah ASEAN. Organisasi tersebut berusaha untuk menahan ambisi Vietnam yang dirasakan dengan menggagalkan invasi dan pendudukannya di Kamboja. Dari tahun 1979 hingga 1982, ASEAN memimpin upaya diplomatik pada forum Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk menyangkal legitimasi politik Vietnam di Kamboja dengan secara diplomatik mendukung pemerintahan Demokratik Kampuchea (DK) yang digulingkan yang dipimpin oleh Khmer Merah. Ketika opini internasional menentang rezim DK atas tindakan genosida, ASEAN membangun koalisi Khmer yang diperluas dengan memasukkan pasukan nasionalis Son Sann dan pasukan royalis Norodom Sihanouk untuk membentuk Pemerintahan Koalisi Demokrasi Kampuchea (CGDK). Rasionalisasi yang ditawarkan ASEAN untuk kebijakan ini adalah untuk menolak preseden Vietnam untuk mengatur kembali hubungan antar negara regional melalui penggunaan kekuatan dan untuk mencegah Thailand menjadi negara 'garis depan' komunisme melalui pendudukan Kamboja. Secara terpisah, Thailand, bersama dengan Tiongkok, mendirikan perkemahan perbatasan untuk CGDK di perbatasan Thailand-Kamboja untuk melawan pasukan pendudukan

Vietnam. Bagi Thailand, kebijakan ini merupakan bagian dari keselarasan informal yang lebih luas dengan Tiongkok untuk menggantikan Amerika Serikat sebagai penjamin eksternal untuk keamanannya. ‘Ekspedisi hukuman’ Tiongkok melawan Vietnam pada Februari 1979 adalah untuk meredakan kekhawatiran keamanan Thailand dan juga untuk mendukung Khmer Merah. Cukuplah untuk mengatakan bahwa keterlibatan ASEAN dalam situasi Kamboja membawa koherensi organisasi dan visibilitas internasional yang jauh lebih besar. Sementara itu, Brunei bergabung dengan ASEAN pada tahun 1984 setelah Inggris mencabut status protektoratnya atas negara tersebut.

Pada saat situasi Kamboja diselesaikan oleh masyarakat internasional yang lebih luas yang pada gilirannya dipimpin oleh PBB, ASEAN merumuskan kembali agenda baru pada tahun 1990-an. Secara bersamaan, ia mengejar perluasan keanggotaan untuk mencakup semua negara di kawasan Asia Tenggara. Dalam hal inisiatif politik, ASEAN awalnya meningkatkan status *Post-Ministerial Conference* (PMC) pada tahun 1992 dan kemudian meresmikan Forum Regional ASEAN (ARF) sebagai forum keamanan multilateral regional utama pada Juli 1994. Ini juga meningkatkan kolaborasi keamanan untuk menangani sejumlah masalah keamanan transnasional seperti perompakan, perdagangan narkoba ilegal, dan migrasi ilegal. Selain itu, ASEAN membentuk inti dalam **Kerja Sama Ekonomi Asia Pasifik (APEC) yang dibentuk pada tahun 1989**. Dalam prakarsa ekonomi, APEC mendukung ‘segitiga pertumbuhan’ regional sebagai pendorong kerja sama intra-ASEAN dan pada tahun 1993, menandatangani pakta yang pada akhirnya akan mengarah pada Area Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 2008. Jadwal ini kemudian dikurangi sehingga akan berlaku pada tahun 2002.

Untuk memenuhi tujuannya dalam memperluas keanggotaan yang mencakup seluruh kawasan, ASEAN menerima Vietnam ke dalam organisasi pada Juli 1995 dan Laos dan Burma/Myanmar pada Juli 1997. Pecahnya konflik domestik di Kamboja pada tahun 1997 antara pasukan Hun Sen dan Norodom Ranariddh berujung pada penundaan keanggotaan Kamboja. Kamboja kemudian bergabung pada April 1999. Perluasan keanggotaan ASEAN mengubah kalibrasi dan pandangan organisasi karena sekarang memiliki tiga negara anggota dengan sistem partai tunggal (Vietnam, Laos, dan Kamboja) dan sebuah negara dengan junta militer yang berkuasa (Myanmar). Dimasukkannya negara otoriter militer sebenarnya bukanlah tanpa preseden, karena Indonesia, Filipina, dan Thailand semuanya memiliki pemerintahan seperti itu selama sejarah pendirian ASEAN. Namun bergabungnya Myanmar membawa serta perbedaan internal antara Filipina dan Thailand di satu sisi dan anggota yang tersisa di sisi lain, tentang cara terbaik menangani pendatang baru. Pertimbangan semacam itu setidaknya sebagian dipicu oleh kesulitan diplomatik yang dihadapi ASEAN dengan Amerika Serikat dan Uni Eropa atas pendatang baru.

Prakarsa ASEAN telah memasukkan upaya untuk secara kolaboratif melibatkan negara-negara Asia Timur Laut melalui mekanisme yang dilembagakan dalam pengelompokan ASEAN + 3 yang mencakup Tiongkok, Jepang, dan Korea Selatan. Upaya pelembagaan lebih lanjut dan formal pengelompokan ini oleh Malaysia melalui lokasi sekretariat permanen di Kuala Lumpur telah gagal. Selain tekanan eksternal dari Amerika Serikat dan negara-negara sekutu Baratnya untuk membendung apa yang dianggap sebagai regionalisme eksklusif, ada juga kecemasan di dalam ASEAN. Indonesia yang menjadi tempat sekretariat ASEAN dan Singapura yang menjadi tempat sekretariat APEC tak mau kewalahan. Ada juga kecurigaan yang meluas bahwa entitas yang baru tersebut hanyalah sebuah reformulasi dari

Pengelompokan Ekonomi Asia Timur (EAEG) yang kemudian diturunkan levelnya menjadi Kaukus Ekonomi Asia Timur (EAEC) dalam pembahasan ASEAN.

Ada sejumlah kekuatan internal yang menekan ASEAN dan evolusi serta agendanya. Salah satu kekuatan yang lebih serius adalah mudurnya kepemimpinan kolektif regional dan kelembagaan ASEAN setelah jatuhnya pemerintahan otoriter Suharto pada Mei 1998. Kekuasaan Suharto di Indonesia jelas menstabilkan lingkungan regional dan kesediaan negara-negara anggota untuk memberikan status *primus inter pares* kepada Indonesia dalam ASEAN juga menahan ambisi hegemoni Indonesia di kawasan. Gejolak politik dan pergantian rezim yang cepat di Indonesia pasca-Suharto tidak menumbuhkan kondisi yang dibutuhkan untuk konsolidasi politik dalam negeri, apalagi kepemimpinan regional. Selama masa-masa yang lebih baik, Indonesia dapat mencoba menengahi kebuntuan Kamboja, meskipun tidak berhasil dengan *Jakarta Informal Meetings (JIM)* pada tahun 1988, berperan sebagai perantara yang jujur dalam mencoba menyelesaikan klaim teritorial Kepulauan Spratly yang disengketakan antara Tiongkok dan negara-negara anggota ASEAN pada tahun 1990-an melalui dialog informal tahunan, dan menengahi gencatan senjata antara pemerintahan Ramos di Filipina dan Front Pembebasan Nasional Moro (MNLF) pada tahun 1996. Kepemimpinan regional seperti itu tidak ada lagi dan bisa dibilang ASEAN lebih lemah karenanya.

3. Metode Penelitian

3.1 Objek Penelitian

Objek penelitian adalah tujuan ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan fungsi tertentu tentang sesuatu yang objektif, valid, dan dapat diandalkan mengenai variabel tertentu (Sugiyono, 2014). Dalam penelitian ini, objek penelitian yang digunakan oleh penulis adalah ASEAN yang berperan sebagai aktor dalam penyelesaian krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021 dengan merumuskan *Five-Point Consensus* (5PC) demi meredakan ketegangan lebih lanjut di Myanmar.

3.2 Jenis Penelitian

Metode penelitian yang digunakan oleh penulis adalah metode kualitatif oleh John W. Creswell. Ciri-ciri metode kualitatif adalah mengandalkan data teks dan gambar, memiliki langkah-langkah unik dalam analisis data, dan menggunakan desain yang beragam. Menulis bagian metode untuk proposal penelitian kualitatif sebagian membutuhkan mendidik pembaca tentang maksud penelitian kualitatif, menyebutkan desain khusus, dengan hati-hati merenungkan peran yang dimainkan peneliti dalam penelitian, menggambar dari daftar jenis sumber data yang terus berkembang, menggunakan protokol khusus untuk merekam data, menganalisis informasi melalui beberapa langkah analisis, dan menyebutkan pendekatan untuk mendokumentasikan keakuratan atau validitas data yang dikumpulkan.

Metode kualitatif proposal memerlukan perhatian pada topik dengan cara menerangkan pembaca tentang desain yang digunakan dalam penelitian dan, dalam hal ini, penggunaan penelitian kualitatif

dan maksud dasarnya. Ini juga melibatkan pembahasan sampel untuk penelitian dan prosedur pengumpulan dan perekaman data secara keseluruhan. Ini lebih lanjut memperluas langkah-langkah analisis data dan metode yang digunakan untuk menyajikan data, menafsirkannya, memvalidasinya, dan menunjukkan potensi hasil penelitian. Berbeda dengan desain lain, pendekatan kualitatif mencakup komentar peneliti tentang peran mereka, dan jenis khusus dari strategi kualitatif yang digunakan. Selanjutnya, karena struktur penulisan proyek kualitatif dapat sangat bervariasi dari studi ke studi, bagian metode juga harus mencakup komentar tentang sifat produk akhir tertulis (Creswell, 2014).

Penelitian kualitatif adalah penelitian interpretatif; penanya biasanya terlibat dalam pengalaman yang berkelanjutan dan intensif dengan peserta. Berbagai isu strategis, etis, dan pribadi diperkenalkan ke dalam proses penelitian kualitatif (Locke et al, 2013). Dengan pertimbangan ini, penanya secara eksplisit mengidentifikasi secara refleksi bias, nilai, dan latar belakang pribadi mereka, seperti jenis kelamin, sejarah, budaya, dan status sosial ekonomi yang membentuk interpretasi mereka selama penelitian. Selain itu, mendapatkan akses ke situs penelitian dan masalah-masalah etika yang mungkin muncul juga merupakan elemen dari peran peneliti.

Data kualitatif penting dalam menentukan frekuensi ciri atau karakteristik tertentu. Ini memungkinkan ahli statistik atau peneliti untuk membentuk parameter di mana kumpulan data yang lebih besar dapat diamati. Ini menyediakan sarana bagi pengamat agar dapat mengukur dunia di sekitar mereka. Data kualitatif juga adalah tentang emosi atau persepsi orang, serta apa yang mereka rasakan.

Pengumpulan data kualitatif bersifat eksplorasi, dengan melibatkan analisis dan penelitian mendalam. Metode pengumpulannya terutama berfokus pada perolehan wawasan, penalaran, dan motivasi; karenanya, mereka masuk lebih dalam dalam penelitian. Karena data ini

tidak dapat diukur, peneliti lebih memilih metode atau alat pengumpulan data yang terstruktur sampai batas tertentu (QuestionPro). Sesuai dengan jenis penelitian ini, penulis akan mampu memberikan gambaran serta penjelasan mengapa ASEAN belum berhasil dalam menyelesaikan krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021. Selain itu, dengan jenis pendekatan kualitatif pula, penulis akan menjadikan teori dan konsep yang digunakan penulis sebagai dasar demi membantu penulis mengelaborasi penelitian yang dilakukan.

3.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan penulis dalam penelitian adalah data primer dan sekunder. Sumber data primer adalah sumber data yang langsung menyediakan data untuk pengumpul data (Sugiyono, 2012). Sumber data sekunder adalah sumber data yang telah dikumpulkan melalui sumber primer dan tersedia bagi peneliti untuk digunakan dalam penelitian mereka sendiri dan juga jenis data yang telah dikumpulkan di masa lalu (Formplus, 2022).

Sumber data primer diperoleh melalui wawancara dengan tiga narasumber dari Kementerian Luar Negeri RI, yaitu:

1. Bapak Laurentius Amrih Jinangkung (Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional (HPI) Kementerian Luar Negeri RI)
2. Bapak Rheinhard Sinaga (*Counsellor*-Diplomat Madya Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri RI yang khusus menangani isu Myanmar)
3. Bapak Ronald E. Tundang (diplomat Kementerian Luar Negeri RI yang sedang cuti belajar sekaligus *founder* Peta Kebijakan)

Adapun sumber data sekunder diperoleh melalui dokumen jurnal, artikel *online*, buku-buku, dan publikasi ilmiah.

3.4 Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif melibatkan proses dan prosedur untuk menganalisis data dan memberikan beberapa tingkat pemahaman, penjelasan, dan interpretasi pola dan tema dalam data tekstual. Teknik analisis data kualitatif yaitu sebagai berikut.

- Analisis deskriptif

Teknik analisis ini menggunakan data kualitatif dan mengelaborasinya secara deskriptif. Ini terkadang disebut sebagai bentuk analisis data yang paling sederhana karena menggambarkan tren dan hubungan tetapi tidak menggali lebih dalam. Analisis deskriptif sangat berguna untuk mengomunikasikan perubahan dari waktu ke waktu dan menggunakan tren sebagai batu loncatan untuk analisis lebih lanjut guna mendorong pengambilan keputusan (Cote, 2021).

- Analisis wawancara

Teknik analisis ini menggunakan daftar pertanyaan yang akan dijawab oleh narasumber. Wawancara sangat penting untuk mendapatkan data yang kurang terukur dari sumber langsung. Mereka memungkinkan peneliti untuk memberikan cerita dan perspektif yang berhubungan dan bahkan mengutip kontributor penting secara langsung. Banyak data kualitatif dari wawancara memungkinkan penulis menghindari pernyataan yang cenderung dilebih-lebihkan dan menjaga integritas konten mereka juga (Rev, 2022). Dengan metode ini, penulis mampu mendapatkan informasi pelengkap awal tentang keterlibatan ASEAN dalam penyelesaian krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021.

3.5 Waktu dan Tempat Penelitian

Tempat dan waktu yang digunakan penulis dalam penyusunan penelitian ini adalah sebagai berikut.

- Rumah Penulis: Perumahan Jatijajar Blok D21/12A, Jalan Raya Bogor km 35.5, Jatijajar, Kec. Tapos, Depok, Jawa Barat 16457
- Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia: Jl. Taman Pejambon No.9, RW.5, Senen, Kec. Senen, Kota Jakarta Pusat, Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10410

Adapun rencana waktu penelitian ini adalah sebagai berikut.

Tabel 1. Waktu Penelitian

No	Uraian Kegiatan	(Bulan) Tahun 2022				(Bulan) Tahun 2023				
		9	10	11	12	1	2	3	4	5
1.	Pengumpulan <i>Outline</i>	■								
2.	Penyusunan Proposal		■	■	■					
3.	Bimbingan Proposal		■	■	■					
4.	Sidang Proposal					■				
5.	Revisi Proposal					■	■			

6.	Bimbingan Skripsi												
7.	Pengumpulan Data												
8.	Analisis Data												
9.	Penyusunan Hasil Penelitian												
10.	Sidang Skripsi												

BAB IV

4. Pembahasan

4.1 Dinamika Kekuasaan Militer di Myanmar

Myanmar memperoleh kemerdekaan dari kekuasaan kolonial Inggris pada 4 Januari 1948 dengan nama Burma. Persatuan Burma dimulai sebagai demokrasi parlementer dengan U Nu yang terpilih sebagai Perdana Menteri yang pertama. Namun, pemerintahan U Nu tidak mampu menjaga persatuan nasional karena menghadapi berbagai tantangan domestik, yaitu hubungan antaretnis, korupsi, salah urus, dan pemberontakan dari berbagai organisasi bersenjata etnis (EAO).

Tetapi demokrasi perwakilan hanya bertahan hingga tahun 1962, ketika Jenderal Ne Win melakukan kudeta militer pada tanggal 2 Maret. Alasan di balik kudeta Ne Win adalah pertikaian politik, kebuntuan kebijakan, berbagai pemberontakan etnis skala besar, dan perekonomian yang menurun. Setelah kudeta, pemerintah militer menengguhkan konstitusi dan menunjuk Dewan Revolusioner (RC) untuk memerintah Burma melalui dekrit.

Di bawah Jenderal Ne Win, Burma menjadi negara sosialis satu partai di bawah Partai Program Sosialis Burma (BSPP) hingga 1988. Periode 1962-1988 dibagi menjadi dua fase, yaitu periode pemerintahan militer langsung (1962-1974) dan fase kediktatoran konstitusional (1974-1988).

Ne Win mengumumkan “Jalan Burma menuju Sosialisme” sebagai ideologi nasional Burma. Sesuai dengan ideologi tersebut, dilaksanakan kebijakan Burmanisasi penuh dan terjadi nasionalisasi tanah, perbankan, perdagangan asing, sektor asuransi, perkapalan, sekolah swasta, dan industri. Tanah dan kekayaan juga didistribusikan kembali. Bisnis-bisnis yang dimiliki oleh orang India dan Tionghoa

dikembalikan ke warga asli Burma. Pembentukan partai politik lainnya dilarang dan hanya BSPP yang dinyatakan sah.

Fase kedua pemerintahan Ne Win, yaitu fase kediktatoran konstitusional, dimulai pada tahun 1974 dengan pembubaran RC. Memasuki era 1980-an, Burma mengalami krisis ekonomi yang parah. Pada tahun 1987, demi menyelamatkan perekonomian nasional dan memberantas pasar gelap, Ne Win melarang uang kertas 25, 35, dan 75 kyat dan menggantikannya dengan uang kertas 45 dan 90 kyat pada tanggal 5 September 1987. Pada tahun yang sama, Burma menerima status *Least Developed Country* (LDC) oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

Pada Juli 1988, Ne Win mengundurkan diri dan kekuasaan politik diteruskan oleh Jenderal Sein Lwin. Popularitas Sein Lwin rendah di kalangan publik Burma karena keterlibatannya dalam pemadaman demonstrasi mahasiswa Universitas Rangoon pada tahun 1962. Pada Agustus 1988, mahasiswa dari banyak universitas di Myanmar melakukan pemogokan umum dan memaksa Sein Lwin untuk mengundurkan diri dan digantikan oleh Maung Maung, yang mengakhiri darurat militer, membebaskan tahanan politik, dan mengizinkan pembentukan beberapa partai politik dan Federasi Serikat Mahasiswa Seluruh Burma (ABFSU). Namun, demonstrasi anti-pemerintah tetap meluas hingga mencakup biksu Buddha dan kelas profesional, serta menyebar dari Yangon ke kota-kota lain. Tatmadaw secara brutal menindak massa pro-demokrasi, mengonsolidasikan kembali kekuasaannya pada Agustus 1988, dan mengumumkan pemilu yang akan diadakan pada tahun 1990. Jenderal Saw Maung merebut kekuasaan pada tanggal 18 September dan membentuk junta militer yang baru, Dewan Pemulihan Hukum dan Ketertiban Negara (SLORC) yang terdiri dari 19 perwira tinggi militer. Dipercaya secara luas bahwa

Ne Win yang telah digulingkan masih mempertahankan pengaruhnya pada rezim SLORC (Devi, 2014).

Pada tahun 1989, SLORC mengubah nama negara dari Burma menjadi “Myanmar” dan ibu kotanya Rangoon menjadi “Yangon”. Bagi SLORC, Burma adalah istilah era kolonial yang cenderung menguntungkan etnis mayoritas Bamar dan nama Myanmar lebih inklusif terhadap 135 kelompok etnis yang diakui oleh pemerintah. SLORC menyelenggarakan pemilu pada tahun 1990 di mana oposisi Liga Nasional untuk Demokrasi (NLD) yang dipimpin oleh Aung San Suu Kyi menang telak. Bukannya menerima hasil pemilu, SLORC malah menjadikan Aung San Suu Kyi sebagai tahanan rumah. SLORC dan penerusnya, Dewan Perdamaian dan Pembangunan Negara (SPDC), menolak untuk melakukan dialog politik serius dengan NLD.

Pada tahun 2007, terjadilah Revolusi Saffron, gelombang unjuk rasa anti-pemerintah yang meluas yang dipicu oleh kenaikan harga bahan bakar dan dinamai berdasarkan jubah berwarna kunyit yang dikenakan oleh para biksu Buddha yang berpartisipasi. Dihadapkan dengan tekanan masyarakat internasional, SPDC mulai melonggarkan kendali politik, menyatakan kerelaannya untuk mengurangi ketergantungan kuat Myanmar pada Tiongkok, serta menghilangkan status Myanmar sebagai “negara paria.” Hal ini membuka jalan bagi diresmikannya konstitusi baru pada tahun 2008, yang menganugerahkan Tatmadaw kekuasaan yang lebih luas bahkan di bawah pemerintahan sipil (Maizland, 2022).

Ketua SPDC sekaligus kepala Tatmadaw, Than Shwe, mengundurkan diri dan menyerahkan kekuasaan kepada pemerintahan sipil pada Maret 2011. Mantan jenderal dan Perdana Menteri Myanmar, Thein Sein menjadi presiden pertama Myanmar yang terpilih secara demokratis. Thein Sein memelopori serangkaian reformasi, termasuk memberikan pengampunan kepada para tahanan politik, melonggarkan

sensor media, dan meliberalisasi ekonomi untuk mendorong investasi asing ke Myanmar, serta mengizinkan partisipasi Aung San Suu Kyi yang telah dibebaskan dari tahanan rumah dalam politik Myanmar. Dampak dari reformasi di bidang teknologi informasi dan komunikasi (TIK) terjadi pada September 2011, ketika Thein Sein secara tiba-tiba menghentikan proyek Bendungan Myitsone, yang pembangunannya tidak disepakati oleh publik Myanmar.

Partai NLD menang telak pada pemilu sela April 2012, menjadi partai oposisi terbesar di legislatif nasional. Sejak dibebaskan dari tahanan rumah, Aung San Suu Kyi telah melakukan perjalanan ke Thailand, Norwegia, Inggris, Amerika Serikat, dan India untuk menyerukan penghapusan pembatasan dan pelanggaran sanksi dan isolasi internasional yang diberlakukan bagi Myanmar. Di sisi lain, laju reformasi meyakinkan AS dan UE untuk mencabut sanksi ekonomi dan keuangan mereka dan memungkinkan Myanmar untuk bersaing dalam ekonomi global (Win, 2019).⁵

Pada tahun 2015, Myanmar mengadakan pemilu multipartai nasional pertamanya, yang dimenangkan oleh NLD. Para anggota parlemen baru memilih Htin Kyaw, orang kepercayaan lama Suu Kyi, sebagai presiden. Tetapi kekuasaan yang sebenarnya dan mutlak ada di tangan Suu Kyi, yang menjabat sebagai Penasihat Negara (sebuah jabatan yang baru dibentuk), sekaligus kepala pemerintahan Myanmar secara de facto.

⁵ Maizland, L. (2022, 31 Januari). Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict. Council and Foreign Relations. <https://www.cfr.org/background/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya>

Gambar 1 Demonstrasi Anti-Kudeta di Mandalay, Myanmar



Sumber: The Japan Times

104

Pada tanggal 1 Februari 2021, Jenderal Senior Min Aung Hlaing dan para pemimpin militer lainnya melakukan kudeta. Langkah itu dilakukan setelah partai proksi militer, Partai Persatuan Solidaritas dan Pembangunan (USDP), mengalami kekalahan dalam pemilu 2020. Junta militer yang baru, yang secara resmi disebut Dewan Administrasi Negara (SAC), menahan dan mendakwa Aung San Suu Kyi dengan tuduhan korupsi dan kejahatan lainnya. Mereka juga menjadikan para anggota parlemen NLD dan partai lain, serta banyak aktivis HAM, sebagai tahanan rumah.

Unjuk rasa besar-besaran meletus secara nasional dalam beberapa minggu setelah kudeta. Puluhan ribu orang, termasuk petugas kesehatan, bankir, dan guru, bergabung dengan gerakan pembangkangan sipil (CDM) yang damai, menolak untuk bekerja hingga kekuasaan pemerintahan terpilih dipulihkan. Para anggota parlemen NLD yang digulingkan, pemimpin protes, dan perwakilan dari beberapa kelompok etnis minoritas Myanmar membentuk Pemerintah

Persatuan Nasional (NUG), demi menyatukan kelompok-kelompok yang berbeda yang menentang junta, mendorong persatuan yang lebih kuat di antara kelompok-kelompok etnis Myanmar yang beragam, merumuskan agenda untuk tata kelola Myanmar pasca-junta, dan mengumpulkan dukungan diplomatik internasional. Pada September 2021, presiden sementara NUG, Duwa Lashi La, menyatakan perang terhadap junta militer Myanmar dan membentuk divisi bersenjata, Pasukan Pertahanan Rakyat (PDF).

Pembungkaman terhadap perbedaan pendapat dan pelanggaran hak asasi manusia berat yang dilakukan pemerintahan SAC selama krisis politik pasca-kudeta menuai kecaman dari PBB, pemerintah asing, dan pemantau HAM global. Dalam beberapa hari setelah kudeta dimulai, pasukan junta ¹¹¹ menembakkan peluru tajam ke arah para pengunjung rasa sipil dan tempat tinggal penduduk. Menurut *Assistance Association of Political Prisoners* (AAPP) yang berbasis di Mae Sot, Thailand, sedikitnya 1.500 orang tewas di tangan Tatmadaw. Lebih dari 8.000 orang, termasuk jurnalis, pekerja medis, dan politisi NLD, telah ditangkap oleh aparat keamanan junta sejak kudeta terjadi (Maizland, 2022).

4.2 Krisis Politik dan Kemanusiaan Pasca-Kudeta Myanmar 2021

Kerusuhan luas telah merajalela sejak kudeta, termasuk unjuk rasa harian di seluruh negeri yang sering mengarah ke kekerasan. ¹¹ Pelanggaran hukum hak asasi manusia dan hukum humaniter internasional yang sering terjadi dilaporkan, termasuk pengeboman tanpa pandang bulu dan penembakan terhadap warga sipil oleh pasukan keamanan junta. Pasukan keamanan dilaporkan ³⁶ telah membunuh lebih dari 800 warga sipil dan menangkap hampir 6.000 selama empat bulan pertama setelah terjadinya kudeta militer. Selain itu, kekerasan yang

sudah berlangsung sebelumnya akibat bentrokan antara Tatmadaw dan berbagai organisasi bersenjata etnis (EAO) di beberapa bagian negara tersebut semakin parah. Akibatnya, situasi kemanusiaan Myanmar semakin memburuk, dengan hampir 200.000 warga sipil sejauh ini terpaksa meninggalkan rumah mereka.

Menyebarnya kekerasan, bersamaan dengan munculnya gerakan pembangkangan sipil (*civil disobedience movement/CDM*) yang dibentuk oleh para pegawai negeri yang memboikot pekerjaan sebagai bentuk protes terhadap kekuasaan SAC yang dianggap ‘ilegal’ oleh mereka, menimbulkan kesulitan ekonomi yang signifikan, menghambat penyediaan banyak layanan penting oleh pemerintah, dan memperburuk krisis kemanusiaan di seluruh negeri. Situasi yang memburuk dengan cepat dapat dilihat di Myanmar tenggara, terutama di Negara Bagian Kayah, di mana laporan PBB yang dirilis pada 8 Juni 2021 menekankan kebutuhan kritis akan akses mendesak ke makanan, tempat tinggal, dan layanan kesehatan baik untuk populasi yang melarikan diri maupun yang tersisa. Laporan itu juga mencatat bahwa banyak warga sipil yang mengungsi mencari perlindungan di Negara Bagian Shan yang berdekatan, dengan potensi besar untuk melintasi perbatasan internasional (*European Institute for Asian Studies (EIAS)*, 2021).

Selama berlangsungnya krisis pula, rezim SAC mengintimidasi para pekerja bantuan asing. Pada Mei 2021, *Médicins Sans Frontières* (MSF) melaporkan bahwa pasukan keamanan junta mengatakan kepada staf di salah satu kliniknya bahwa mereka tidak dapat merawat para pengunjung rasa yang terluka. Pasukan SAC juga menggerebek organisasi lain yang merawat pengunjung rasa anti-junta dan bahkan menghancurkan persediaan medis yang dimiliki mereka. Selain itu, Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) mencatat bahwa telah terjadi 260 insiden serangan terhadap petugas dan fasilitas kesehatan.

Tindakan-tindakan tersebut menghancurkan sistem layanan kesehatan Myanmar yang sudah terbelakang bahkan ketika gelombang ketiga wabah COVID-19 menyebar ke seluruh negeri. Tingkat positif telah menurun dari puncaknya mendekati 40 persen pada pertengahan 2021, tetapi masih berkisar sekitar delapan persen. Para pekerja kemanusiaan yang berbicara dengan *Refugees International* menunjukkan bahwa angka tersebut jauh lebih tinggi di antara beberapa populasi yang paling rentan, termasuk mereka yang berada di kamp-kamp IDP.

Aliran pengungsi terbesar dari Myanmar adalah ke India dan Thailand. Menurut UNHCR, diperkirakan 15.000 orang telah memasuki India pada September 2021, dimana dalam satu minggu, 5.500 dari mereka tiba di negara bagian Mizoram yang berbatasan dengan negara bagian Chin Myanmar, melarikan diri dari pertempuran antara Tatmadaw dan Pasukan Pertahanan Chin. Ketika penjaga perbatasan India tidak memaksa mereka yang melarikan diri dari Myanmar untuk kembali, Pemerintah India mengambil pendekatan yang kontradiktif, yaitu berusaha untuk menangkap dan menahan para pencari suaka. Pemerintah India juga menolak akses UNHCR kepada mereka; menurut *Human Rights Watch*, hal ini menyebabkan mereka “rentan untuk ditangkap, ditahan, dan kemungkinan dikembalikan ke Myanmar.” Terlepas dari krisis Rohingya 2017, para pejabat pemerintah India telah berulang kali mengancam akan mengembalikan orang-orang Rohingya ke Myanmar, termasuk puluhan yang ditahan setelah kudeta terjadi.

Thailand menerima sekitar 7.000 pengungsi yang melarikan diri dari serangan udara junta pada Maret dan April 2021. Para pejabat pemerintah Thailand awalnya mengizinkan mereka untuk mencari perlindungan tetapi dilaporkan menekan mereka untuk kembali ke Myanmar. Thailand juga mencegah UNHCR dan LSM-LSM internasional menemui para pengungsi yang baru tiba. Di luar

penyeberangan perbatasan langsung, Thailand juga mengancam akan menangkap warga Myanmar yang memprotes kudeta militer (Sullivan, 2021).

Pada tahun 2022, hampir setengah dari populasi (sekitar 25 juta) Myanmar jatuh ke dalam jurang kemiskinan. Tantangan terkait COVID-19, pembatasan pergerakan, perlambatan ekonomi, ditambah dengan tantangan unjuk rasa yang sedang berlangsung dan meningkatnya ketidakamanan, pembatasan perbankan, arus kas terbatas, dan pemblokiran bantuan yang disengaja oleh rezim SAC menghalangi tanggapan kemanusiaan global yang memadai. Setidaknya 425.000 orang baru mengungsi sejak kudeta, sehingga jumlahnya menjadi satu juta pada tahun 2022. Namun, akses kemanusiaan melambat ketika Tatmadaw mencoba untuk menaklukkan gerakan perlawanan bersenjata.

Menurut laporan terbaru pada tahun 2022, 14,4 juta orang Myanmar membutuhkan bantuan kemanusiaan. Situasi keamanan manusia telah memburuk di beberapa daerah di Myanmar, termasuk daerah-daerah yang sebagian besar terhindar dari perang saudara selama beberapa tahun terakhir (Banerjee, 2022).

4.3 Reaksi Regional dan Internasional terhadap Kudeta Militer Myanmar 2021

Kudeta militer di Myanmar pada 1 Februari 2021 menuai tanggapan regional dan global yang bervariasi. Malaysia memandang perkembangan yang sedang berlangsung di Myanmar dengan 'keprihatinan serius' dan menyerukan kepada militer agar memprioritaskan jaminan perdamaian, serta mendesak semua pihak terkait untuk menegakkan supremasi hukum. Lebih lanjut, Perdana Menteri Malaysia Muhyiddin Yassin juga menyebut kudeta tersebut

sebagai “satu langkah mundur dalam proses demokrasi di Myanmar” (Yassin, 2021). Terlepas dari keprihatinannya, Pemerintah Malaysia memerintahkan deportasi 1.200 warga Myanmar, yang ditentang oleh *Amnesty International* dan *Asylum Access*, di mana izin tinggal sementara diberikan.

Pandangan Indonesia sangat mirip dengan pandangan Malaysia, karena Indonesia meminta para pihak yang relevan untuk menegakkan ‘prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional’ dan mendesak mereka untuk menahan diri. Yuyun Wahyuningrum, perwakilan Indonesia untuk *ASEAN Intergovernmental Commission on Human Rights (AICHR)*, mengatakan bahwa kudeta militer Myanmar 2021 merupakan pelanggaran terhadap prinsip penegakan tata kelola konstitusional yang terkandung dalam Piagam ASEAN, sementara Eva Kusuma Sundari, mantan ketua *ASEAN Inter-Parliamentary Myanmar Caucus (AIPMC)*, menyarankan agar Indonesia memberlakukan embargo terhadap bisnis para tokoh militer Myanmar demi mencegah pelanggaran hak asasi manusia dan kekejaman lebih lanjut. Karena itu, usai bertemu dengan PM Malaysia Muhyiddin Yassin, Presiden Indonesia Joko Widodo mengatakan bahwa menteri luar negeri kedua negara sepakat untuk mendesak Ketua ASEAN agar mengadakan pertemuan khusus tentang Myanmar.

Singapura menyatakan ‘keprihatinan besar’ atas memburuknya situasi di Myanmar dan berharap agar para pihak yang relevan ‘menahan diri’ dan ‘mempertahankan dialog’, serta menolak untuk menyediakan pengakuan diplomatik untuk SAC sebagai pemerintahan Myanmar yang sah. Menteri Luar Negeri Singapura, Vivian Balakrishnan menyebut kekerasan yang dilakukan junta militer terhadap para pengunjuk rasa damai sebagai ‘rasa malu nasional.’

Negara-negara anggota ASEAN lainnya yaitu Kamboja, Laos, Filipina, Thailand, dan Vietnam memandang kudeta militer tersebut

sebagai urusan domestik Myanmar, meskipun Filipina kemudian mengubah pendiriannya. Brunei yang menjabat sebagai Ketua ASEAN periode 2021 menyerukan “dialog, rekonsiliasi, dan pemulihan keadaan normal sesuai dengan kehendak dan kepentingan publik Myanmar.” Lebih lanjut, dalam pernyataan yang dikeluarkan oleh Sekretariat ASEAN, Brunei menegaskan pentingnya berpegang teguh pada prinsip-prinsip demokrasi, sebagaimana tertuang dalam Piagam ASEAN (Mahaseth et al, 2022).

Sementara itu, di antara tetangga non-ASEAN Myanmar, India, tetangga barat Myanmar, menyatakan keprihatinannya seraya menegaskan kembali dukungannya untuk peralihan demokrasi Myanmar. Namun, India memilih untuk berhati-hati dalam mengkritik pemerintahan junta Myanmar yang baru dengan tegas karena kolaborasi dalam sektor keamanan, kontra-pemberontakan, dan manajemen perbatasan yang dalam, kuat, dan telah terjalin sejak lama dengan Tatmadaw, yang mencakup operasi gabungan terkoordinasi pada Mei 2019. India termasuk di antara delapan negara asing yang menghadiri parade militer di ibu kota Myanmar, Naypyidaw, pada 27 Maret 2021 untuk memperingati Hari Angkatan Bersenjata Myanmar yang berlangsung sebulan setelah kudeta militer. Selain menghadiri parade militer tersebut, India juga meningkatkan penjualan senjatanya ke Myanmar sejak kudeta. Selain itu, karena keprihatinan akan menguatnya pengaruh Tiongkok, India tidak ingin membahayakan hubungan militer-ke-militernya dengan Naypyidaw dan ingin mengekang kelompok pemberontak timur laut yang beroperasi dari Myanmar, suatu hal yang tidak mungkin tanpa adanya kerja sama dengan Tatmadaw (Min, 2022).

Reaksi Tiongkok, tetangga utara Myanmar, dapat diprediksi. ²¹ Juru bicara Kementerian Luar Negeri Tiongkok, Wang Wenbin ³⁹ berharap bahwa ‘semua pihak di Myanmar mampu menangani

perbedaan mereka dengan baik di bawah konstitusi dan kerangka hukum untuk menjaga stabilitas politik dan sosial.' Lebih lanjut, Wenbin menambahkan bahwa Tiongkok adalah tetangga yang ramah bagi Myanmar. Kunjungan luar negeri pertama Presiden Tiongkok Xi Jinping pada tahun 2020 adalah ke Myanmar dan Tiongkok menjadi investor asing terbesar kedua di Myanmar setelah Singapura. Bisa dikatakan bahwa Tiongkok mematuhi prinsip non-intervensi yang diproklamarikan terhadap urusan domestik negara lain. Dengan demikian, bersama dengan Rusia, Tiongkok memveto segala upaya Dewan Keamanan PBB untuk secara terbuka mengancam perebutan kekuasaan Tatmadaw, apalagi menyerukan intervensi internasional untuk memulihkan pemerintahan dan parlemen terpilih Myanmar.

Rusia memperkuat hubungan yang sudah ada dan menampilkan diri sebagai mitra yang dapat diandalkan bagi Tatmadaw. Kehadiran Wakil Menteri Pertahanan Rusia dalam Hari Angkatan Bersenjata Myanmar pada tanggal 26 Maret 2021, hanya sehari sebelum tindakan keras paling mematikan sejauh ini terhadap para pengunjuk rasa anti-kudeta, bergema secara luas di pers internasional. Perwakilan Rusia adalah pejabat asing tertinggi yang hadir. Pada titik ini, Rusia mungkin juga hadir sebagai negara yang mampu membangun hubungan paling dekat dengan junta militer Myanmar. Kerja sama militer-teknis yang dijalin selama 20 tahun, yang disegel oleh perjanjian kerja sama militer formal yang ditandatangani pada 2016, telah menghasilkan ikatan yang kuat antara kedua negara, yang kedalamannya juga dibuktikan oleh pelatihan ribuan perwira militer Myanmar dalam bidang ilmu pengetahuan dan teknik tingkat lanjut di Rusia (Mezzera, 2021).

Presiden Amerika Serikat Joe Biden menyerukan agar kudeta militer dihentikan dan para pemimpin sipil (termasuk Aung San Suu Kyi) dibebaskan. "Rakyat Burma membuat suara mereka didengar dan dunia menyaksikan," kata Biden, bersumpah untuk mengambil tindakan

lebih lanjut jika diperlukan. “Ketika protes berkembang, kekerasan terhadap mereka yang menggunakan hak demokrasi mereka tidak dapat diterima dan kami akan terus menyerukannya,” tambahnya. Departemen Keuangan AS merilis daftar delapan sasaran baru sanksi, termasuk presiden sementara Myanmar Myint Swe, menteri dalam negeri Soe Htut, menteri pertahanan Sein Win, serta tiga perusahaan di sektor batu giok dan permata (BBC, 2021).

Tanggapan Uni Eropa senada dengan AS, dimana Presiden Komisi Eropa Ursula von der Leyen, Presiden Dewan Eropa Charles Michel, dan kepala urusan luar negeri Uni Eropa Josep Borrell mengutuk kudeta tersebut. “Pemerintahan sipil yang sah harus dipulihkan, sejalan dengan konstitusi negara dan pemilihan November 2020. Saya menyerukan pembebasan semua yang ditahan dengan segera dan tanpa syarat,” tulis von der Leyen di Twitter (Adkins, 2021). Di antara mereka yang terkena sanksi adalah ketua SAC Min Aung Hlaing, yang terkena pembekuan aset dan daftar hitam larangan visa. “Panglima Tertinggi Min Aung Hlaing terlibat langsung dan bertanggung jawab atas pengambilan keputusan mengenai fungsi negara dan karena itu bertanggung jawab atas rusaknya demokrasi dan supremasi hukum,” kata jurnal resmi Uni Eropa. 11 orang yang terlibat dalam kudeta militer Myanmar dan penindasan terhadap demonstran menjadi sasaran sanksi (DW, 2021).

4.4 Peran ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Politik Pasca-Kudeta Militer Myanmar 2021

Myanmar menjadi anggota penuh ASEAN pada tahun 1997 bersama Laos, meskipun ada kekhawatiran Amerika Serikat dan negara-negara Barat lainnya akan buruknya catatan hak asasi manusia dari sebuah negara yang diperintah oleh rezim militer sejak tahun 1962.

Thailand dan Filipina juga waspada, tetapi pada akhirnya memberi jalan bagi ‘persatuan’ ASEAN. Dengan 10 negara anggota, “potensinya akan luar biasa. Kami akan menjadi pemain penting di Asia dan di dunia,” kata Perdana Menteri Malaysia kala itu, Mahathir Mohamad tentang perlunya memperluas keanggotaan blok regional tersebut (Aljazeera, 2022).

ASEAN Way merupakan proses pengambilan keputusan yang menekankan pada diskusi, konsensus, kesetaraan anggota, serta pentingnya kerja sama meskipun diperlukan waktu yang lama untuk diskusi untuk mencapai kesepakatan. Para pendukungnya berpendapat bahwa proses pengambilan keputusan ini meyakinkan negara-negara anggota untuk saling menghormati satu sama lain dan menciptakan perdamaian regional. Di sisi lain, *ASEAN Way* seringkali disalahkan atas ketidakmampuan organisasi regional tersebut dan kurangnya hasil yang terlihat untuk menyelesaikan masalah regional yang terjadi, salah satunya adalah isu Myanmar.

Sebagai kerangka manajemen konflik, Hoang dan Caballero-Anthony mengonseptualisasikan *ASEAN Way* sebagai serangkaian proses yang menekankan pada pengendalian diri dan akomodasi kepentingan yang berbeda dalam mengelola perbedaan, menerima praktik budaya musyawarah dan mufakat (konsultasi dan konsensus), serta setuju untuk tidak setuju sambil mengesampingkan kebutuhan untuk menyelesaikan perbedaan. Tetapi pada saat perbedaan intra-regional sebagian besar dikelola melalui praktik dan norma informal ini, *ASEAN Way* tidak menghalangi peran pihak ketiga untuk menyelesaikan sengketa bilateral. Contoh yang baik untuk hal ini adalah keputusan Malaysia dan Indonesia untuk menggunakan forum Mahkamah Keadilan Internasional (ICJ) untuk menyelesaikan sengketa kedaulatan mereka atas kepemilikan pulau Sipadan dan Ligitan (Woon, 2012).

Amitav Acharya, yang mengambil pendekatan sosio-konstruktif dalam kajian regionalisme Asia Tenggara, mendefinisikan *ASEAN Way* sebagai seperangkat norma dan proses pembangunan identitas, yang “bersandar pada prinsip-prinsip modern konvensional tentang hubungan antar negara, serta mode sosialisasi dan pengambilan keputusan khusus tradisi dan budaya yang umum di Asia Tenggara” (Acharya, 2009). Menurut Acharya, sementara prinsip-prinsip hubungan antarnegara seperti non-intervensi dan menghindari penggunaan kekuatan dapat dianggap sebagai norma legal-rasional yang tidak unik di ASEAN, praktik sosio-kultural informalitas dan pembangunan konsensus, non-konfrontatif, dan non-hegemonik adalah apa yang membuat ini khas ASEAN. Dibudidayakan dengan tekun selama bertahun-tahun, norma-norma ini telah mengembangkan tingkat ‘kekakuan’ yang cukup kuat untuk memengaruhi perilaku ¹⁴ negara-negara di Asia Tenggara dan kawasan Asia-Pasifik yang lebih luas.

Sebagai budaya diplomatik dan keamanan, Jurgen Haacke juga menggambarkan *ASEAN Way* sebagai ‘kerangka kerja normatif... dalam menengahi perselisihan, memandu interaksi, dan menopang proses konstruksi identitas’ (Haacke 2003). Singkatnya, *ASEAN Way* merupakan bagian integral dari kerangka normatif yang telah mendefinisikan tata kelola kawasan dalam hal serangkaian proses dan institusi, baik secara informal maupun formal dalam menjaga ¹⁴ perdamaian dan keamanan di Asia Tenggara dan kawasan yang lebih luas.

¹⁴ *ASEAN Way* berhasil menjaga kawasan Asia Tenggara tetap stabil, aman, dan damai. Norma-norma *ASEAN Way* adalah ‘prinsip kesepakatan dan kerukunan, kepekaan, kesopanan, non-konfrontasi, dan kesesuaian’. Keberhasilan lain yang dicapai oleh ASEAN melalui *ASEAN Way* adalah fakta bahwa perang di antara anggota pendiri

ASEAN menjadi 'tidak terpikirkan' karena menjadi bagian dari ASEAN telah menjadi bagian dari identitas mereka (Busse, 1999).

Pada saat yang sama, *ASEAN Way* tidak hanya tentang prinsip-prinsip yang disepakati di antara anggota tetapi juga berfungsi dalam hal sosial budaya. Konsep tersebut muncul pada tahun 1990-an untuk digunakan bersama dengan *Asian values* meskipun ada perbedaan yang jelas antara keduanya, yang sering ditunjukkan tidak hanya oleh aktor eksternal tetapi juga oleh anggota ASEAN sendiri. Seperti *ASEAN Way*, *Asian values* juga tidak memiliki definisi yang jelas, tetapi berakar pada peradaban dan budaya Asia yang menekankan kolektivisme, disiplin sosial, dan kekuasaan hierarkis dibandingkan dengan individualisme yang dijunjung oleh Barat. Meskipun Mahathir Mohamad (Malaysia) dan Lee Kuan Yew (Singapura) sama-sama merupakan penganjur *Asian values* yang terkemuka, negara mereka masing-masing didominasi agama Islam dan Konghucu, dengan banyak elemen budaya lainnya.

(Thompson, 2001) menguraikan dengan menyatakan bahwa model *Asian values* bertentangan dengan demokrasi liberal Barat dengan nilai-nilai keluarga neo-Konfusianisme, ketertiban, dan penghormatan individu sebagai prinsip inti. Secara organik model ini menyatu dengan hak prerogatif negara pembangunan di mana warga tunduk pada pemerintah otoriter dengan tidak terlibat dalam aktivisme sosial dan memberikan kebebasan yang signifikan kepada pemerintah dalam mengarahkan bidang ekonomi, sosial, dan politik berdasarkan premis bahwa kohesi sosial, ketertiban, dan stabilitas sangat penting (Thompson 2000: 654). Jones (2011a, 2011b) dan Thompson (2001) berpendapat bahwa alasan di balik ini adalah bahwa negara-negara ASEAN bukanlah negara kosmopolitan yang progresif tetapi sangat tidak liberal dan didukung oleh berbagai tingkat otoritarianisme yang melihat hak asasi manusia dan kelompok terkait sebagai ancaman terhadap pola tradisional, dengan demikian kadang-kadang

menggunakan prinsip-prinsip *ASEAN Way* tentang non-interferensi dan kedaulatan. Dengan evaluasi sejarah Tiongkok, India, dan Mughals, (Sen, 1997b) menyimpulkan bahwa tidak ada korelasi statistik untuk premis-premis yang diajukan oleh pendukung atau penyebar *Asian values* karena terlalu banyak faktor yang terlibat dalam menentukan keberhasilan ekonomi. Selanjutnya, Sen (1997a, 1997b) menyatakan bahwa logika filosofis yang menjadi dasar dari wacana ini adalah bakar diri karena mengandaikan “Asia” bersatu dan orang-orangnya bertentangan dengan “Barat” tetapi seluruh premis dari logika ini adalah bahwa budaya itu unik dan sangat spesifik untuk budaya yang menjadi pusat perdebatan sehingga bertentangan dengan dirinya sendiri (Dalton dan Ong, 2005).

Selain itu, terlepas dari *Asian values*, *ASEAN Way*, berbeda dengan pengalaman Uni Eropa (UE), tidak mengembangkan lembaga supranasional yang mengharuskan negara anggota untuk secara sukarela menyerahkan kedaulatannya. Selama 40 tahun pendirian ASEAN, negara-negara anggotanya tidak pernah dan tidak mau membahayakan kedaulatan satu sama lain. Berdasarkan Deklarasi Bangkok, ASEAN harus menolak segala bentuk ⁵⁴ campur tangan asing dalam urusan dalam negeri setiap negara anggotanya dan hal ini dianggap sebagai hal yang tidak dapat dirundingkan. Selanjutnya ASEAN menganggap ketahanan nasional sangat diperlukan demi mewujudkan keamanan dan kolaborasi regional.

Contoh keberhasilan *ASEAN Way* yang menonjol adalah ketika Perang Vietnam-Kamboja. Pada akhir 1970-an, Vietnam membebaskan Kamboja dari rezim Khmer Merah yang membantai hampir dua juta penduduk sipil Kamboja dalam sebuah genosida. Meskipun demikian, tindakannya dianggap tidak dapat diterima karena mengubah rezim negara lain secara paksa. ASEAN saat itu mendukung Khmer Merah sebagai pemerintahan sah Kamboja tetapi menolak untuk mengirim

senjata kepada mereka. ASEAN memelopori penyelesaian sengketa melalui diplomasi di PBB dan akhirnya Perang Vietnam-Kamboja berhasil mencapai penyelesaian pada tahun 1991 setelah beberapa rangkaian konferensi diadakan.

Dua alasan mengapa proses pengambilan keputusan berbasis konsensus dipandang sebagai suatu keharusan adalah 1) karena negara-negara anggota sangat menekankan pada pemeliharaan kedaulatan masing-masing negara sehingga para aktor negara menghormati anggota lainnya dengan proses yang panjang dan sering disebut sebagai proses yang tidak efektif untuk mencapai pemahaman umum dan 2) ASEAN adalah komunitas kekuatan yang setara. Tidak ada satu pun negara di ASEAN yang memiliki kekuatan yang jauh lebih besar daripada yang lain. Singapura sebagian besar adalah negara terkaya di ASEAN, dianggap sebagai negara yang sangat kecil sehingga tidak akan terlihat sebagai negara yang kuat. Sementara itu, Indonesia sebagai negara terbesar secara geografis dan jumlah penduduk berhadapan dengan masalah domestik seperti korupsi dan lemahnya kekuatan ekonomi. Kekuatan dan kelemahan kedua negara memberikan keseimbangan kekuatan di kawasan yang membuat pengambilan keputusan *ASEAN Way* terus menjadi suatu hal yang lumrah di ASEAN. Terakhir, negara-negara anggota ASEAN memiliki kesamaan budaya yang membedakan mereka dari belahan dunia lain.

Dalam kasus sengketa wilayah yang sedang berlangsung di Laut Tiongkok Selatan antara Tiongkok, Taiwan, dan lima negara ASEAN (Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Vietnam), Filipina memilih untuk tidak menggunakan *ASEAN Way* sebagai jalur dalam mengatasi sengketa dan mengklaim hak maritimnya. Sebaliknya, mereka mengajukan kasus dan mencari keputusan dari *Permanent Court of Arbitration (PCA)* pada tahun 2013 tentang hak hukum negara di bawah Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS).

Bertentangan dengan apa yang ditentukan oleh *ASEAN Way*, hal ini dilakukan tanpa konsultasi sebelumnya dengan anggota ASEAN lainnya.

Meskipun Bab 8 Piagam ASEAN 2008 menjelaskan mekanisme tentang cara menyelesaikan perselisihan intra-regional dan Cetak Biru Masyarakat Politik-Keamanan ASEAN (APSC) 2009 mendefinisikan sentralitas ASEAN dalam keamanan kawasan dan memperkuat otonomi kawasan Asia Tenggara dalam hubungannya dengan kekuatan eksternal, khususnya Tiongkok dan AS, tidak ada satu pun negara anggota ASEAN yang pernah menggunakannya dalam menyelesaikan sengketa.

Prinsip non-interferensi adalah fondasi inti asli yang mendasari hubungan regional antara negara-negara anggota ASEAN (Keling et al. 2011). Prinsip tersebut pertama kali dituangkan dalam dokumen dasar ASEAN, Deklarasi Bangkok, yang dikeluarkan pada tahun 1967. Deklarasi Bangkok menyatakan bahwa negara-negara anggota bertekad untuk mencegah campur tangan pihak asing guna memastikan stabilitas domestik dan regional (Stubbs, 2008). Kebijakan non-interferensi ditegaskan kembali dalam Deklarasi Kuala Lumpur tahun 1997 (Keling et al, 2011). Hal itu diperkuat lebih lanjut dalam Traktat Persahabatan dan Kerja Sama (TAC) tahun 1976, di mana prinsip non-interferensi dalam urusan internal setiap anggota secara eksplisit menjadi salah satu prinsip dasar ASEAN (Stubbs, 2008).

Seperti yang dinyatakan oleh (Bellamy et al, 2011) bahwa: “Terlepas dari fakta bahwa ASEAN tidak berusaha untuk mendefinisikan apa yang dimaksud dengan ‘gangguan’, praktik regional sebelum pertengahan 1990-an menunjukkan bahwa itu ditafsirkan sebagai rangkaian keterlibatan. dalam urusan dalam negeri negara yang berkisar dari komentar politik yang paling ringan hingga intervensi militer yang koersif”. Penafsiran yang luas ini menyebabkan

fungsi kebijakan non-interferensi sebagai pengaturan untuk pencegahan tindakan apa pun oleh negara-negara anggota ASEAN yang mungkin akan merusak kekuasaan elite politik yang dominan dan mengganggu tata kelola domestik di negara-negara anggota mana pun (Ruland 2011). Oleh karena itu, prinsip non-interferensi tidak boleh dianggap hanya sebagai cita-cita, tetapi juga sebagai alat politik (Nesadurai, 2009).

Dengan berakhirnya Perang Dingin, elite kapitalis baru mulai mencampuri urusan negara satu sama lain karena mereka bersaing untuk memanfaatkan peluang investasi di seluruh kawasan untuk memaksimalkan kekayaan mereka. Namun, terlepas dari banyaknya pelanggaran yang dilakukan oleh negara-negara anggota, prinsip non-interferensi tetap berdampak besar pada pelaksanaan urusan regional ASEAN, karena otonomi negara dan stabilitas domestik umumnya lebih diprioritaskan daripada tata kelola yang efektif di kawasan Asia Tenggara secara keseluruhan (Ruland, 2011). Memang selama bertahun-tahun, praktik politik ASEAN dan pendekatan pengambilan keputusannya tampaknya sangat dipengaruhi oleh kepedulian bersama untuk mencegah campur tangan pihak luar dalam urusan domestik (Katanyuu, 2006).

Prinsip konsensus ASEAN telah dipuji karena membawa dan menjaga persatuan anggota ASEAN dalam kerja sama regional terlepas dari keragaman yang luas di antara mereka, yaitu Brunei, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Singapura, Thailand, Filipina, dan Vietnam. Namun jika dipikir-pikir, harga persatuan juga mahal, mengingat negara-negara anggota ASEAN masih belajar bagaimana bekerja sama satu sama lain dan terus bergulat dengan segudang masalah keamanan dan sejarah mereka sendiri, serta sengketa wilayah. Sebagai negara bangsa (atau setidaknya sebagian besar dari mereka) yang memperoleh kemerdekaan setelah membebaskan diri mereka dari belenggu kolonialisme belum lama ini, penerapan prinsip non-

interferensi mereka untuk mencegah pelanggaran kedaulatan nasional di masa depan tampaknya menjadi sikap yang sah. Dalam pengertian ini, nilai yang ASEAN tekankan pada konsensus sangat diperlukan keberadaannya di tengah kesatuannya dalam keragaman.

Tetapi meskipun norma ini adalah bagian dari alasan kelangsungan hidup ASEAN selama lima dekade terakhir, mungkin sudah waktunya bagi ASEAN hari ini untuk menyesuaikan norma konsensusnya dengan realitas baru di sekitarnya. Sengketa Laut Tiongkok Selatan bisa menjadi contoh. Pada KTT ASEAN ke-30 di Manila pada tahun 2017, Pemerintah Tiongkok melobi keras agar blok regional ini menghindari penyebutan proyek reklamasi tanah dan upaya militerisasi, yang menyebabkan penundaan dalam penerbitan pernyataan biasa. Pada akhirnya, unjuk persatuan di kawasan itu dicadangkan, tetapi insiden itu juga menjelaskan kepada banyak orang bahwa pengaruh Tiongkok dapat dirasakan dan semuanya terlalu nyata.

Tidak mengherankan, ASEAN mendapat reaksi keras dari insiden ini, termasuk kritik yang mengatakan bahwa sentralitas ASEAN telah diguncang oleh China – dan difasilitasi oleh norma konsensusnya sendiri. Beberapa kalangan sekali lagi menyerukan agar prinsip 'ASEAN minus X' diterapkan dalam hal-hal yang biasanya diputuskan melalui konsensus, bukannya terbatas pada bidang ekonomi.

ASEAN tidak menggolongkan represi politik junta Myanmar (pembungkaman terhadap perbedaan pendapat, pemenjaraan lawan politik, diskriminasi terhadap etnis minoritas, dan penggunaan pekerja anak) sebagai masalah hak-hak demokrasi. Represi merupakan masalah internal yang pada akhirnya dapat diselesaikan dengan jalur bilateral. ASEAN mengembangkan gaya diplomasi 'diam-diam' dan informal untuk Myanmar dengan memprioritaskan rasa hormat, toleransi terhadap keragaman, dan penolakan untuk mengecam junta penguasa.

ASEAN menentang wacana tentang tata kelola yang baik dan isu-isu demokrasi. Paradoksnya, keseimbangan preferensi dalam blok regional ini cenderung mendukung negara-negara yang diperintah oleh rezim otoriter, yang sangat ingin mengecualikan upaya untuk masuk ke dalam debat intra-regional tentang tema pemerintahan dan kemanusiaan. Namun ada pengecualian, seperti negara-negara ASEAN yang mengembangkan kerangka politik nasional, liberal-demokratis, dan aktor non-negara yang terlibat dalam berbagai bidang aktivisme sosial. Terlepas dari fragmentasi perdebatan intra-regional ini, penolakan terhadap ‘orang lain dari luar’ adalah pola umum yang menyatukan para pendukung demokrasi dan otoritarianisme.

Perubahan sikap ASEAN terhadap junta militer Myanmar yang kaku dan berpikiran sempit didorong oleh pembantaian Depayin 2003, yaitu serangan pimpinan massa terhadap para pendukung Aung San Suu Kyi yang kala itu menjadi tokoh oposisi anti-junta yang terkemuka. ASEAN kemudian menjadi termotivasi untuk berbicara secara terbuka tentang demokratisasi Myanmar dalam komunikasi bersama para menteri ASEAN pada Juni 2003, yang disampaikan di Phnom Penh, Kamboja. ‘Demokrasi’ adalah kata baru yang masuk dalam dokumen resmi ASEAN. Praktik otoriter dan khususnya perlakuan junta militer terhadap Aung San Suu Kyi menjadi ‘masalah’ dalam hubungan ASEAN dengan Myanmar.

Pada tahun 2007, meletusnya Revolusi Saffron menunjukkan ketidaksabaran ASEAN terhadap sikap keras kepala junta militer Myanmar yang berkuasa saat itu, *State Peace and Development Council* (SPDC). ASEAN mengungkapkan kekesalannya dalam pernyataan bersama dengan Uni Eropa yang tidak mengikat dan tidak menetapkan tenggat waktu yang harus dipatuhi oleh rezim SPDC. Koran anti-pemerintah Myanmar, *The Irrawaddy*, berasumsi bahwa diktator militer Myanmar saat itu, Jenderal Than Shwe, mengerti ‘bagaimana bermain

dengan kelompok asing yang lemah seperti ASEAN menggunakan cara yang mutakhir.’ Berbeda dengan dugaan bahwa reputasi ASEAN sangat rendah, Menteri Luar Negeri Singapura saat itu, George Yeo, menyiratkan bahwa ‘ASEAN berencana menggunakan wewenang moralnya untuk melibatkan semua partai politik di Myanmar dalam dialog yang tulus.’

Mathew Davies memperingatkan agar tidak menekan ASEAN untuk mengadopsi praktik kepatuhan keras gaya Uni Eropa, dengan alasan bahwa ASEAN dapat mengatasi masalah negara paria (*pariah state*) “tanpa perombakan radikal dari struktur politik dan prosedural yang tidak sesuai dengan tujuannya” (2012, 16-17). Namun, dalam kurun waktu empat tahun sejak Davies membuat argumen ini, ASEAN sejauh ini tidak mampu mengekang pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di banyak negara anggotanya. Kegagalan untuk memastikan kepatuhan, baik melalui pemaksaan retorik atau mekanisme campur tangan, berarti prakarsa hak asasi manusia di ASEAN seperti AICHR dan AHRD sebagian besar telah gagal mencapai tujuan mereka untuk mencapai “martabat manusia dan pencapaian kualitas hidup yang lebih tinggi untuk [semua] masyarakat ASEAN” (ASEAN 2013, 13). Masih ada kekhawatiran yang serius mengenai kelayakan tindakan non-interferensi dalam konteks pelanggaran hak asasi manusia yang sedang berlangsung.

Mendasari kegagalan prakarsa hak asasi manusia ASEAN untuk membawa kemajuan yang berarti di kawasan ini adalah kurangnya homogenitas konfigurasi politik antara negara-negara anggota. (Davies, 2005) menyatakan bahwa status demokrasi masing-masing negara berdampak kuat pada sejauh mana perjanjian hak asasi manusia diadopsi dan berhasil diratifikasi, sementara negara yang lebih otokratis cenderung menolak prakarsa semacam itu, sehingga menghasilkan memburuknya lingkungan hak asasi manusia (2014, 427-428). Diambil

dalam konteks dengan kesulitan-kesulitan yang dialami ASEAN dalam membawa negara-negara parianya 'ke dalam kelompok', ASEAN harus fokus pada upaya-upaya demokratisasi sebelum melanjutkan upaya-upaya sosialisasi di negara-negara anggotanya yang lebih autokratis. Dengan memfokuskan upaya mereka untuk membangun pemerintahan yang stabil, bertanggung jawab, dan demokratis di luarnya, upaya untuk membangun agenda hak asasi manusia yang berhasil akan terbukti jauh lebih mudah dan efektif.

Negara-negara anggota ASEAN berupaya untuk mencegah masalah Myanmar menghalangi upaya integrasi mereka, yaitu Piagam ASEAN dan pembentukan Masyarakat ASEAN. Dalam sebuah surat kepada Than Shwe, Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong mengungkapkan keprihatinan para pemimpin regional. Perdana Menteri Myanmar, Thein Sein, menjawab bahwa situasi di negaranya adalah 'urusan domestik', sekaligus menegaskan kembali kode etik tradisional junta. Hal tersebut telah dibahas ⁴⁹ pada KTT ASEAN ke-13 di Singapura pada tahun 2007 dan ditegaskan pada paragraf ke-16 Pernyataan Ketua ASEAN (Marchi, 2014).⁶

Masalah ASEAN dengan Myanmar sebenarnya dimulai pada tahun 2017 dengan terjadinya genosida minoritas Muslim Rohingya, ketika ⁴³ 370.000 orang Rohingya melarikan diri ke negara tetangga Bangladesh. Ratusan ribu lainnya berbelok ke timur menuju tetangga ASEAN mereka yang lainnya. Mereka yang menyerukan tindakan menekankan tidak hanya banyaknya masalah kemanusiaan dan pengungsi, tetapi juga potensi krisis legitimasi terkait ASEAN itu sendiri. Kavi Chongkittavorn, mantan asisten khusus sekretaris jenderal ASEAN, menyatakan bahwa "kredibilitas ASEAN dan kedudukan

⁶ Marchi, L. (2014). ASEAN vis-à-vis Myanmar: what influences at play? The London School of Economics and Political Science. <http://eprints.lse.ac.uk/64792/>

internasionalnya akan sangat ternoda jika ASEAN tetap acuh tak acuh terhadap krisis Negara Bagian Rakhine [wilayah dengan populasi Rohingya yang besar].” Lebih dari 150 organisasi internasional menandatangani surat terbuka yang menuntut tindakan global yang nyata di Myanmar, mencatat “dengan kekecewaan atas kegagalan Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara” dan mempertanyakan keefektifan dan tujuan organisasi tersebut.

Kudeta militer meletus kembali pada tahun 2021, yang membatalkan reformasi ekonomi politik yang diprakarsai Thein Sein. Kudeta tersebut memicu kemarahan publik Myanmar, khususnya generasi muda yang berkembang di negara yang telah mengalami proses peralihan demokrasi selama satu dekade terakhir, tetapi pasukan militer junta menanggapi protes damai mereka dengan kekerasan.

Gambar 2 KTT Khusus ASEAN pada April 2021 di Jakarta



Sumber: The Jakarta Post

Untuk menyelesaikan krisis politik dan kemanusiaan Myanmar yang semakin memburuk, ASEAN mengumumkan Konsensus Lima

Poin (*Five-Point Consensus/5PC*). Berikut adalah ketentuan dari Konsensus Lima Poin.

- 1) Menghentikan kekerasan dengan segera dan menyerukan kepada semua pihak yang bertikai agar menahan diri sepenuhnya. Menurut *Assistance Association for Political Prisoners* (AAPP), pemerintah junta Myanmar yang baru mengeksekusi setidaknya empat orang, menghukum mati setidaknya 123 orang, dan menangkap 21.334 orang – dengan 17.446 orang masih ditahan. Mereka juga menyiksa para tahanan, menewaskan sedikitnya 3.239 orang, termasuk serangan yang melanggar hukum yang membunuh dan melukai warga sipil melalui penggunaan serangan udara yang mematikan, eksekusi di luar hukum, penembakan artileri, ranjau darat terlarang, dan peluru tandan. Menurut Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA), sejak kudeta, pertempuran telah membuat 1,4 juta orang mengungsi di dalam negeri, membakar, atau menghancurkan 60.000 properti sipil dan mendorong 75.400 orang mengungsi ke negara tetangga. Selain itu, pada 10 Mei 2023, bersamaan dengan berlangsungnya KTT ASEAN ke-42 di Labuan Bajo, Indonesia, pasukan junta membakar hidup-hidup 19 warga sipil (termasuk delapan anak-anak) di Desa Nyaung Pin Thar, Provinsi Bago. Semua ini menyiratkan bahwa militer Myanmar menolak untuk menghentikan kekerasan terhadap warga sipil.
- 2) Memulai dialog konstruktif antara semua pihak terkait untuk mencari solusi damai demi kepentingan rakyat Myanmar. Pada 7 April 2023, Pendeta Samson, seorang tokoh agama dan komunitas Kachin, divonis enam tahun penjara atas dakwaan perkumpulan ilegal, pencemaran nama baik, dan terorisme yang

melanggar hukum. Dakwaan ini digunakan sebagai alat oleh junta militer Myanmar untuk membungkam dan menghukum mereka yang menggunakan hak untuk kebebasan berbicara. Dialog yang konstruktif tidak mungkin bisa terlaksana jika pemenjaraan dan penahanan secara sewenang-wenang masih berlangsung.

- 3) Mengangkat ⁸¹ utusan khusus Ketua ASEAN untuk mempermudah proses mediasi dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN. Pada Maret 2022, Utusan Khusus ASEAN untuk Myanmar, Prak Sokhonn, mengunjungi Myanmar untuk pertama kalinya dan bertemu dengan Jenderal Senior Min Aung Hlaing, namun pihak militer dilaporkan menolaknya untuk bertemu dengan kelompok masyarakat sipil mana pun atau anggota NLD yang memenangkan kursi terbanyak dalam pemilu 2020. Militer Myanmar juga menolak permintaan Utusan Khusus untuk bertemu dengan Aung San Suu Kyi. Kegagalan untuk bertemu dengan pihak lain selain para petinggi junta militer Myanmar membuktikan bahwa ASEAN belum mampu memungkinkan mediasi.
- 4) Mengirim bantuan kemanusiaan melalui Pusat Koordinasi Bantuan Kemanusiaan ASEAN (*AHA Centre*). Junta sengaja memblokir bantuan kemanusiaan untuk mereka yang membutuhkan sebagai bentuk hukuman kolektif, bahkan pada 7 Mei 2023, konvoi bantuan kemanusiaan *AHA Centre* yang membawa diplomat Indonesia dan Singapura mengalami penyerangan oleh pihak yang tidak dikenal di Negara Bagian Shan sebelah timur laut.

- 5) Kunjungan ²¹ utusan khusus dan delegasi ASEAN ke Myanmar untuk bertemu dengan semua pihak terkait (*Human Rights Watch*, 2022). Junta melarang utusan khusus ASEAN pada tahun 2021 dan 2022 masing-masing, Erywan Yusof dan Prak Sokhonn, untuk menemui para ¹¹⁹ pemimpin sipil Myanmar yang ditahan oleh pihak junta militer setelah kudeta. Bahkan pada Juli 2022, junta militer Myanmar mengeksekusi empat aktivis pro-demokrasi (termasuk Ko Jimmy dan pembuat undang-undang Phyto Zeya Thaw) yang menuai kecaman dari kepala HAM PBB Michelle Bachelet. Pada Desember 2022, pemerintahan junta Myanmar menghukum Aung San Suu Kyi 33 tahun penjara dalam persidangan yang sangat bias dan tidak transparan (*Amnesty International*, 2023).

4.5 Dinamika ASEAN dalam Penyelesaian Krisis Politik Pasca-Kudeta Militer Myanmar 2021

⁵⁸ Yanghee Lee, mantan Pelapor Khusus PBB untuk situasi hak asasi manusia di Myanmar, mengatakan bahwa Konsensus Lima Poin gagal karena blok regional tersebut mengambil keputusan yang salah, yaitu memilih untuk mengadakan pembicaraan dengan SAC alih-alih NUG. Lee yang merupakan anggota Dewan Penasihat Khusus untuk Myanmar (SAC-M) menambahkan bahwa NUG mewakili Myanmar secara sah dan pantas untuk melakukan *engagement* dengan ASEAN. “NUG menunjukkan bahwa mereka adalah mitra konstruktif yang dibutuhkan ASEAN untuk meraih kemajuan dalam menyelesaikan krisis Myanmar,” tambah Lee (Lee, 2022). Namun, ASEAN terus memberlakukan 5PC sebagai cetak biru untuk pemulihan demokrasi Myanmar.

Kelangsungan FPC yang dirumuskan ASEAN perlu diperiksa jika organisasi regional ingin berada di “kursi pengemudi yang terhormat” dari krisis Myanmar. Menyusul kerusuhan mematikan pasca-kudeta, tampaknya hingga saat ini blok regional hanya mendesak militer Myanmar untuk mengikuti 5PC yang disepakati pada KTT Khusus para pemimpin ASEAN pada April 2021. Utusan Khusus dan delegasi ASEAN telah diizinkan mengunjungi Myanmar untuk bertemu dengan pemimpin kudeta dan beberapa pihak terkait, tetapi tidak dengan semua pemangku kepentingan. Aspek lain dari FPC belum dapat memperoleh daya tarik apa pun di lapangan. ASEAN belum meyakinkan junta untuk sepenuhnya menghormati komitmennya untuk segera menghentikan semua kekerasan, melibatkan semua pihak terkait dalam dialog konstruktif untuk mencari solusi damai demi kepentingan publik Myanmar, memfasilitasi mediasi dengan bantuan Sekretaris Jenderal ASEAN, dan memberikan bantuan kemanusiaan kepada populasi yang rentan.

Sikap junta yang tidak berkomitmen dan tidak kooperatif menghambat pelaksanaan FPC. Jika kondisi ini berlanjut, kredibilitas ASEAN akan dipertanyakan, kecuali jika blok tersebut dapat mendefinisikan kembali strateginya untuk mengoperasionalkan FPC di luar pelarangan terus perwakilan politik junta dari KTT ASEAN di masa depan. Mengatasi sikap keras kepala junta menuntut agar ASEAN mengubah dirinya sendiri untuk menambah kekuatan pada FPC dan mendapatkan komitmen serius dari negara-negara kunci untuk mengembangkan pendekatan yang jelas dan terikat waktu. Pendekatan ini perlu didukung oleh sanksi yang ditargetkan, seperti penangguhan keanggotaan Myanmar atau hukuman lain yang sesuai untuk menekan junta agar menerima FPC secara penuh.

Karena kebuntuan yang sedang berlangsung dalam persaingan kekuasaan antara dua musuh dan beragam pandangan tentara etnis dan

masyarakat internasional, sulit untuk mengidentifikasi potensi skenario yang jelas untuk mempengaruhi junta untuk mereformasi politik pasca-kudeta Myanmar. Junta mungkin terus mengkonsolidasikan kekuasaan melalui intensifikasi kekerasan dan konflik militer, yang menyebabkan fluktuasi ekstrim dalam kedaulatan negara. Jika kekuatan perlawanan mengumpulkan lebih banyak kekuatan dan posisi junta menjadi tidak dapat dipertahankan, transisi kekuasaan ke pemerintahan sipil dapat terjadi dan sistem federal yang demokratis akan terbentuk. Namun, jika junta berhasil menekan perlawanan dan bernegosiasi dengan beberapa EAO dan kelompok kepentingan lainnya, junta militer akan tetap bertahan. Dalam hal ini, jalan menuju transisi demokrasi akan bergantung terutama pada pola pikir dan strategi politik Tatmadaw. Terlalu dini untuk memprediksi skenario mana yang mungkin terjadi di Myanmar. Namun, Tatmadaw, yang memiliki kekuatan militer lebih besar dari kelompok politik lainnya dan berpengalaman dalam intervensi politik, tetap menjadi pemangku kepentingan utama dalam politik dan keamanan Myanmar.

Karena menganut prinsip non-interferensi, ASEAN tidak memiliki kewenangan terhadap Myanmar. Posisi junta militer Myanmar begitu kuat karena mereka tidak ingin ikut dalam pembagian kekuasaan (*power-sharing*).⁷

Penangguhan keanggotaan penuh Myanmar di ASEAN (layaknya Suriah yang keanggotaan penuhnya di Liga Arab ditangguhkan akibat represi pemerintahan Presiden Bashar al-Assad terhadap para pengunjung rasa damai dan pro-demokrasi Musim Semi Arab pada tahun 2011) bukanlah solusi yang tepat untuk penyelesaian krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021. Seharusnya ASEAN

⁹ ⁷ Hasil wawancara dengan Laurentius Amrih Jinangkung (Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional Kementerian Luar Negeri RI) pada tanggal 15 Februari 2023 pada pukul 16.00

melakukan *engagement* dengan pihak Myanmar dan perlu menggunakan “ide kreatif”, yaitu *homegrown democracy*. Jika Indonesia yang menjabat sebagai Ketua ASEAN pada tahun 2023 berhasil menyelesaikan konflik politik Myanmar, Indonesia akan dikenang sebagai *peacemaker*.⁸

Dapat dikatakan bahwa ASEAN telah melanggar prinsip non-interferensi vis-a-vis Myanmar pada tahun 1997, ketika meminta junta untuk memulai dialog dengan Aung San Suu Kyi, sebagai pertimbangan untuk diizinkan masuk ke ASEAN. Contoh lain dari pelanggaran *ASEAN Way* oleh negara-negara anggotanya di Myanmar adalah protes Malaysia dan Indonesia terhadap pengusiran militer Myanmar terhadap minoritas Muslim Rohingya ke Bangladesh. Pemerintah Myanmar, pada pertemuan Menteri Luar Negeri ASEAN tahun 2014, meminta ASEAN untuk menahan diri dari diskusi tentang ‘masalah etnisitas di Myanmar’, ketika masalah Rohingya diangkat. ASEAN membentuk gugus tugas *ad hoc* untuk memantau repatriasi Rohingya dan menyusun laporan berjudul ‘Penilaian Kebutuhan Awal untuk Repatriasi di Negara Bagian Rakhine, Myanmar’, yang memiliki beberapa kekhawatiran, termasuk kegagalan untuk berkonsultasi dengan para pengungsi Rohingya. Gugus tugas dan laporan tersebut lebih berfokus pada repatriasi daripada keselamatan para pengungsi, dan ‘mantra non-interferensi yang berbahaya’ dari ASEAN yang harus disalahkan.

ASEAN Way gagal membuahkan hasil di Myanmar karena penghindaran konflik biasanya mengandaikan perubahan damai yang evolusioner. Karena tidak ada perubahan yang dapat diramalkan pula, tidak banyak yang dapat dilakukan ASEAN. Oleh karena itu, dalam kasus Myanmar, konsultasi informal bekerja melawan keuntungan

⁸ Hasil wawancara dengan Rheinhard Sinaga, S.H., LL.M (*Counsellor-Diplomat Madya* pada Pusat Strategi Kebijakan Kawasan Asia Pasifik dan Afrika Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri RI) pada tanggal 20 Februari 2023 pada pukul 10.00

kumulatif karena kurangnya mekanisme penegakan hukum. Selain itu, *ASEAN Way* dikritik karena memakan waktu, dengan mengacu pada keterlambatan dan ketidaksesuaian yang disebabkan dalam pelaksanaan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Dapat dikatakan bahwa *ASEAN Way* dan kebijakan *constructive engagement* telah berhasil mengutip contoh Topan Nargis, di mana ASEAN bertindak sebagai saluran bantuan internasional dengan memberikan bantuan bantuan darurat melalui Perjanjian ASEAN tentang Manajemen Bencana dan Tanggap Darurat, tetapi kebijakan tersebut tidak terbukti efisien dalam mempengaruhi perubahan politik di negara tersebut. Lebih lanjut, *ASEAN Way* telah terlibat dalam misi troika di Kamboja dan kebijakan ini sangat kontradiktif dengan kebijakan *constructive engagement* ASEAN terhadap Myanmar, yang telah menimbulkan dugaan standar ganda dalam *ASEAN Way*.

Penentang perilaku ASEAN menekankan seberapa banyak organisasi regional ini dapat memajukan integrasi ekonomi dan karena itu menyoroti potensi dampak sanksi ASEAN terhadap Myanmar. Mereka juga menunjukkan bahwa kebulatan suara ASEAN dalam pengambilan keputusan ternyata lebih fleksibel daripada yang terlihat, dan badan tersebut dapat mengambil tindakan yang lebih kuat. Ketika meningkatnya tekanan kemanusiaan dan global dan aliran pengungsi menyebabkan perselisihan domestik, negara-negara anggota ASEAN semakin bersatu melawan Myanmar. Bahkan Kamboja, yang Perdana Menteri Hun Sen menangkis kritik terhadap rezim militer dan merupakan pemimpin asing pertama yang mengunjungi Myanmar setelah kudeta, telah berbalik melawan junta dan melanjutkan kebijakan penolakan ke KTT ASEAN di bawah kepemimpinan mereka. Namun, tidak mungkin keputusan Kamboja didasarkan pada perubahan hati yang nyata, dan bahwa tekanan dari Barat dan negara anggota ASEAN lainnya untuk mengisolasi Myanmar adalah penyebab sebenarnya dari

penolakan ini. Namun demikian, hal itu menunjukkan bahwa tekad ASEAN dalam menentang kekuasaan junta militer Myanmar semakin meningkat.

Pendekatan lain yang dapat diambil ASEAN untuk berperan lebih aktif dalam konflik tersebut adalah dengan mengakui NUG²⁵ pimpinan Aung San Suu Kyi sebagai pemerintah Myanmar yang sah. Ada preseden untuk ini. Di Majelis Umum PBB, Myanmar tetap diwakili oleh NUG, bukan Tatmadaw; ASEAN¹¹² juga bisa melakukan hal yang sama. Selain itu, ASEAN dapat menanggukhan keanggotaan Myanmar sama sekali, meskipun usulan pengecualian ini ditolak dalam diskusi puncak tahun 2022.

Namun, strategi untuk menghukum Myanmar ini mengabaikan betapa tidak disukainya preseden semacam itu di antara beberapa negara anggota ASEAN. Thailand, Laos, dan Kamboja telah menentang pengucilan Myanmar, dengan Thailand muncul sebagai sekutu terdekat junta militer Myanmar di antara jajaran ASEAN. Terlepas dari perjuangannya untuk menampung lebih dari 90.000 pengungsi Myanmar, Thailand bersikeras pada kebijakan diplomasi diam-diam dan menghindari kritik terbuka terhadap pemerintah militer Min Aung Hlaing. Bangkok memiliki alasan bagus untuk mempertahankan prinsip netralitas terhadap negara-negara anggota: Perdana Menteri Thailand Prayut Chan-o-cha sendiri pertama kali berkuasa setelah kudetanya sendiri pada tahun 2014 dan Thailand juga menyaksikan bentrokan mematikan antara umat mayoritas Buddha dan minoritas Muslim. Dari perspektif Bangkok, tanggapan hukuman terhadap Myanmar dari ASEAN juga berpotensi untuk dapat diterapkan pada Thailand di kemudian hari. Laos dan Kamboja juga berbagi simpati yang serupa.

Negara-negara anggota ASEAN mewakili rezim politik dan agama mayoritas yang sangat berbeda dan beragam, dari rezim sosialis partai tunggal Vietnam hingga negara kota Singapura yang berhaluan

barat; dari Thailand yang mayoritas Buddha ke Indonesia yang mayoritas Muslim, atau Filipina yang mayoritas Kristen. Menyatukan organisasi yang beragam ini merupakan sebuah tantangan dan ASEAN telah berhasil justru karena keputusannya menggambarkan denominator bersama yang paling rendah di kawasan ini. Ini tidak berarti bahwa ASEAN tidak efektif; upaya menuju integrasi ekonomi dan perjanjian perdagangan yang berhasil dirundingkan telah mendorong beberapa anggota ASEAN muncul sebagai negara berkembang dengan pertumbuhan ekonomi yang cepat di dunia. Kesuksesan ekonomi pada gilirannya memberikan legitimasi pada para pemimpin negara: “pertumbuhan ekonomi tetap menjadi dasar utama legitimasi politik di negara-negara ASEAN,” sebagaimana ditulis oleh cendekiawan Amitav dan Iain Johnson dalam *Crafting Cooperation* (2007).

ASEAN sangat menolak campur tangan asing, yang telah begitu melukai kawasan Asia Tenggara pada era 1960-an. Organisasi regional tersebut juga berhasil meratifikasi ⁸⁵ Perjanjian Zona Bebas Senjata Nuklir Asia Tenggara (SEANWFZ) untuk mencegah produksi atau penempatan senjata nuklir di antara negara anggota. Ini adalah keberhasilan nyata dalam perdagangan dan keamanan yang harus dibanggakan ASEAN, dan bukti kekuatan pembangunan konsensus regional sebagai sarana untuk menghindari perpecahan. Membiarkan ASEAN untuk ikut campur secara aktif dengan para anggotanya yang melanggar ‘ASEAN Way’ berisiko mempolitisasi dan memecah belah kawasan yang telah berkembang melalui kerja sama dan kolaborasi. Badan lain, seperti PBB, lebih cocok menangani perselisihan politik internasional; politisasi merambah ke ASEAN, tetapi bagi banyak orang tetap tidak diinginkan.

Krisis Myanmar adalah ancaman terberat bagi persatuan ASEAN dalam sejarah modern. Apakah kenetralan dan non-interferensi tradisional ASEAN akan bertahan tetaplah tidak jelas, tetapi mereka

yang menuntut ASEAN mengambil sikap lebih keras terhadap Myanmar tidak boleh melupakan perpecahan yang mungkin terjadi di antara negara-negara anggota.

ASEAN bukan Uni Eropa, karena ASEAN adalah organisasi yang lebih tipis yang membanggakan diri karena tidak ikut campur dalam urusan anggotanya. Keputusannya biasanya mewakili konsensus terbatas yang dapat dicapai di antara negara-negara yang beragam tersebut. Perilaku ini sering disajikan sebagai resep kegagalan, seperti dalam kasus Myanmar, tetapi perspektif ini mengabaikan betapa heterogennya ASEAN, baik itu dari segi pertumbuhan ekonomi dan sistem politik. Begitu pintu terbuka bagi negara-negara anggota untuk mengkritik dan memaksa satu sama lain, perpecahan ASEAN dapat membubarkan organisasi tersebut, merusak integrasi ekonomi dan keamanan yang sejauh ini menandai kesuksesan ASEAN yang berharga, jika berhati-hati.⁹

ASEAN justru harus berkomitmen pada doktrin *Responsibility to Protect* (R2P) dan menindaklanjuti komitmen tersebut dengan tindakan nyata dan tegas. R2P sering disalahpahami sebagai memerlukan penggunaan kekuatan militer. Pada kenyataannya, doktrin tersebut menawarkan sejumlah alat di luar intervensi militer yang diamanatkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB).

Diadopsi dengan suara bulat pada tahun 2005 di KTT Dunia PBB, R2P adalah kerangka kerja dengan serangkaian pilihan kebijakan untuk melindungi populasi yang rentan terhadap genosida, kejahatan perang, pembersihan etnis, dan kejahatan kemanusiaan. Di sini, semua petunjuk bahwa sejak kudeta, kejahatan kemanusiaan, seperti pembunuhan dan serangan sistematis dan tidak sah terhadap warga sipil,

⁹ Ruggi, T. (2023, 19 Februari). Which Way for the 'ASEAN Way': The Myanmar Coup and ASEAN's Response. *The Yale Review of International Studies*. <http://yris.yira.org/comments/5993>

sering terjadi di Myanmar. Dengan demikian, ASEAN harus mengerahkan seluruh perangkat R2P, termasuk sanksi ekonomi, embargo senjata, serta pertanggungjawaban atas kejahatan kekejaman.

Di masa lalu, negara-negara anggota ASEAN telah terbukti menghindari R2P, alih-alih menerapkan *ASEAN Way* dengan kepatuhan buta terhadap prinsip non-interferensi. Pendekatannya sangat ironis. Sebuah gagasan yang dipertahankan dengan keras karena konon kontribusinya terhadap perdamaian dan stabilitas di antara negara-negara anggota, *ASEAN Way* malah menjadi batu sandungan utama bagi usaha bersama untuk secara efektif menanggapi hal-hal yang mengancam stabilitas kawasan.

Pertimbangkan kekejaman militer Myanmar selama bertahun-tahun terhadap kelompok etnis Rohingya di Negara Bagian Rakhine. Karena terhambat oleh *ASEAN Way*, blok regional tersebut gagal mengambil tindakan sebagai tanggapan atas kekejaman massal militer Myanmar. Selama periode 2012-2015, lebih dari 170.000 pengungsi Rohingya kemudian diperdagangkan ke Thailand dan Malaysia. Sindikat kejahatan transnasional, termasuk pejabat pemerintah lokal di wilayah tersebut, menukar ratusan juta dolar dalam perdagangan gelap nyawa Rohingya di seberang Teluk Benggala, memangsa keputusan Rohingya. Kondisi di kapal budak modern sangat menyedihkan. Para penyintas mengatakan kepada *Fortify Rights* tentang pembunuhan, pemerkosaan, pemukulan, dan kekejaman lainnya yang dilakukan oleh para penyelundup di atas kapal, sementara para pejabat pemerintah negara-negara anggota ASEAN menutup mata.

Selain itu, kegagalan berulang ASEAN untuk menangani kekejaman serius di Myanmar telah memberi isyarat kepada militer Myanmar bahwa tetangganya akan menjunjung impunitas. Hal ini berkontribusi pada genosida yang dipimpin militer terhadap minoritas Muslim Rohingya di Negara Bagian Rakhine pada 2016-2017 serta

kejahatan perang di tempat lain di negara itu. ASEAN telah berdiri dan mengawasi berulang kali. Oleh karena itu, tidak mengherankan jika militer Myanmar tampaknya mengandalkan persetujuan ASEAN untuk mengesahkan perampasan kekuasaan mereka.

Akibat pertentangan antara prinsip non-interferensi dan R2P, ASEAN lamban dalam mengimplementasikan R2P secara penuh. Pernyataan Ketua Retret Menteri Luar Negeri ASEAN (*AMM Retreat*) telah mengungkapkan kemungkinan keinginan ASEAN untuk melemahkan “kesucian” non-interferensi. ASEAN secara bertahap mengoordinasikan hubungan antara kedua jenis norma ini dan secara bertahap menginternalisasi norma R2P di tingkat ASEAN seiring perubahan lingkungan internal dan eksternal. Ada dua kasus yang melibatkan R2P dan masalah Myanmar lainnya sebelum tahun 2022, seperti Topan Nargis di Myanmar pada tahun 2008 dan krisis Rohingya di Negara Bagian Rakhine Myanmar antara tahun 2017 dan 2018. Studi kasus mencerminkan sikap ASEAN terhadap internalisasi R2P dan pemeliharaan non-interferensi, memungkinkan tingkat integrasi R2P ke dalam ASEAN untuk dikonfirmasi secara objektif. Dalam kasus Topan Nargis di Myanmar, Topan Nargis melanda negara itu pada tahun 2008. Lebih dari 50 kotapraja di Divisi Yangon dan Ayeyarwady terkena dampak Nargis, termasuk Yangon, kota terbesar di negara itu. Nargis adalah bencana alam paling mematikan di Myanmar, merenggut nyawa hampir 140.000 orang pada saat itu (*United Nations Environment Programme* (UNEP), 2009). Belakangan, ASEAN ditegur karena sikapnya yang tidak ikut campur di masa lalu. Menyusul Topan Nargis, Sekretaris Jenderal ASEAN saat itu, Surin Pitsuwan meminta semua negara anggota untuk memberikan dukungan segera melalui *ASEAN Disaster Management and Emergency Response Agreement* (AADMER). ASEAN mengambil posisi kepemimpinan dan mengambil risiko untuk membujuk pemerintah junta Myanmar agar bersedia untuk

membuka diri dan bekerja sama dengan masyarakat internasional. Dengan demikian, mereka membantu pengembangan saluran bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Berdasarkan kasus krisis Topan Nargis di Myanmar, (Bensaoud, 2015) berpendapat bahwa ASEAN berhasil menciptakan praksis baru yang memadukan nilai-nilai normatif PBB dan antar-ASEAN. Dengan kata lain, partisipasi ASEAN dalam manajemen bencana Topan Nargis menginternalisasi R2P menjadi non-interferensi melalui mediasi, tindakan, dan hibriditas. Berdasarkan kasus krisis Topan Nargis, ASEAN mengadopsi sebagian konsep R2P untuk mengatasi krisis bencana Myanmar dan menjunjung tinggi prinsip non-interferensi (Creac'h & Fan, 2008). Sebaliknya, selama krisis Rohingya 2017, ASEAN hanya mengoordinasikan bantuan kemanusiaan terbatas dan tidak berbuat banyak untuk mengutuk atau secara aktif membujuk pemerintah Myanmar untuk menghentikan kekerasan dan persekusi terhadap Rohingya (Lee, 2018).

Ke depan, tindakan nyata yang dapat diambil ASEAN sudah jelas. Blok tersebut harus mengakui Pemerintah Persatuan Nasional (NUG) sebagai perwakilan negara Myanmar yang sah. Mereka harus menindaklanjuti komitmen yang mereka nyatakan untuk membantu mengakhiri kekerasan di Myanmar dan menyelesaikan krisis. Dan sampai itu terjadi, ASEAN harus berusaha untuk mengurangi keuntungan yang diraup junta secara finansial melalui sanksi yang ditargetkan – termasuk sanksi yang mampu membatasi aliran pendapatan gas sampai demokrasi dipulihkan – serta penegakan embargo senjata untuk menyangkal kemampuan junta untuk memperoleh senjata dari luar negeri. Tindakan-tindakan ini akan menjunjung tinggi komitmen ASEAN terhadap “prinsip-prinsip demokrasi dan pemerintahan konstitusional” dan untuk melindungi hak asasi manusia, menjadikan cara lama ASEAN lebih sejalan dengan R2P serta dengan kebijakan banyak pemerintah di seluruh dunia.

R2P dalam konteks ini juga akan mencakup perlindungan bagi pengungsi dari Myanmar. ASEAN harus memanfaatkan mekanisme hak asasi manusia regionalnya yang ada, Komisi Hak Asasi Manusia Antarpemerintah ASEAN (AICHR), untuk memberikan panduan dalam memastikan perlindungan pengungsi yang memenuhi standar internasional, termasuk mengembangkan prosedur suaka yang didefinisikan dengan jelas, mencegah pemulangan kembali dan penolakan perbatasan, dan menjamin hak untuk bekerja. Paling tidak, negara-negara ASEAN dapat memberikan bantuan kepada ratusan ribu migran Myanmar yang sudah berada di tanah mereka dengan menawarkan status hukum sementara, sebanding dengan Status Perlindungan Sementara (TPS) di Amerika Serikat.

Namun, saat ini penerapan R2P menimbulkan kekhawatiran di Indonesia dan Malaysia. Selagi Indonesia menyatakan minatnya untuk mengembangkan langkah-langkah pencegahan untuk memenuhi prinsip-prinsip *ASEAN Way*, negara ini menyatakan keprihatinannya tentang campur tangan kekuatan asing dalam urusan dalam negeri dan transparansi proses pengambilan keputusan. Akibatnya, Indonesia mengusulkan agar sumber informasi dan diseminasi dalam proses penilaian dilakukan secara transparan dan adil dan Malaysia khawatir bahwa pengesahan R2P di ASEAN berpotensi untuk disalahgunakan untuk memperkuat masyarakat sipil selagi merongrong otoritas negara. Selain itu, Brunei, Singapura, dan Filipina mendukung R2P tetapi mengkhawatirkan intervensi militer yang dapat digunakan untuk meminta dilancarkannya R2P. Seharusnya R2P tidak dimanipulasi menjadi alat untuk mewujudkan perubahan rezim (*regime change*), terutama di kawasan seperti Asia Tenggara, dengan sistem politik yang beragam dan urusan domestik yang rumit. *ASEAN Way* mendorong kesepuluh negara anggota organisasi regional ini untuk mempraktikkan non-interferensi, pengambilan keputusan secara konsensus, dan

penyelesaian sengketa dan konflik secara damai. Bagi banyak orang, keberadaan *ASEAN Way* telah dikaitkan dengan keberhasilan ASEAN dalam mempertahankan kawasan yang relatif stabil selama 30 tahun terakhir sejak awal pendirian organisasi ini pada tahun 1967 (Ramcharan, 2000). Selain itu, pengkritik *ASEAN Way* berpendapat bahwa stabilitas dan keamanan diwujudkan sebagai hasil dari penghindaran konflik alih-alih penyelesaian konflik. Padahal, ASEAN sudah familiar dengan norma dan tujuan R2P. Namun, bagaimana penerapan konsep R2P untuk mendorong mekanisme HAM ASEAN masih dalam pembahasan.

Bagi Myanmar, seruan R2P telah menjadi ciri khas protes kelompok sipil di Myanmar sejak kudeta militer pada Februari 2021. Para demonstran pro-demokrasi lokal di Myanmar ingin menggulingkan junta militer dan mengembalikan kekuasaan yang sah kepada pemerintahan sipil; seruan semacam itu juga dilakukan sebelumnya setelah bencana Topan Nargis dan krisis Rohingya. Mengingat kejahatan kemanusiaan pemerintah militer Myanmar yang dengan sengaja mengabaikan penderitaan korban Topan Nargis, masyarakat internasional cenderung menggunakan sikap tidak bertanggung jawab pemerintah Myanmar untuk membenarkan intervensi kemanusiaan di Myanmar dengan kedok R2P (Emmerson, 2008). Ketika dihadapkan dengan ancaman meminta R2P untuk terlibat secara militer di Myanmar, pimpinan militer Myanmar khawatir bahwa bantuan kemanusiaan internasional akan dikaitkan dengan tujuan politik dari luar, terutama dari negara-negara Barat. Selain itu, sanksi ekonomi dan intervensi militer R2P dikhawatirkan akan memperparah tingkat kemiskinan dan krisis kemanusiaan terkait ekonomi dan hak asasi manusia lainnya di Myanmar. Pemerintahan junta Myanmar mengkhawatirkan pengaruh asing, terutama pengaruh Barat. Adapun bagi junta, itu langkah yang wajar atau masalah yang harus

diprioritaskan untuk mencapai tujuan pengiriman bantuan kemanusiaan (Julian, 2016). Sebagai perbandingan, Myanmar tampak menerima bantuan dari negara-negara ASEAN lainnya dibandingkan dengan negara-negara Barat (Moran, 2008). Menurut penelitian (Shang, 2021), budaya strategis Myanmar memiliki karakteristik sebagai berikut: 1) tidak menoleransi intervensi asing; 2) selalu menempuh jalan kemandirian dalam diplomasi, dan 3) sifat kebijakan luar negeri Myanmar adalah isolasionisme yang ketat. Sikap bermusuhan rezim militer Myanmar terhadap R2P tercermin dalam budaya strategis ini. Cendekiawan muda Yaolong dan Praveen (2021) juga memberikan komentar mereka tentang sikap umum ASEAN dan Myanmar, karena proses pengambilan keputusan penuh dengan permainan politik, R2P bukanlah obat mujarab, dan kapasitasnya terbatas. Untuk pihak ASEAN, karena memahami bahwa intervensi kemanusiaan di bawah R2P yang sepenuhnya diinternalisasi dapat berdampak negatif pada stabilitas regional, ASEAN dapat memilih solusi yang konstruktif dan damai dengan bekerja sama dengan pemerintahan junta dalam R2P yang diinternalisasi sebagian alih-alih secara paksa mengintervensinya.

Ada perbedaan sikap antara pemerintah militer Myanmar dan pengunjuk rasa lokal terhadap penerapan R2P; perbedaan ini juga dapat tercermin dalam konteks ASEAN. Di satu sisi, situasi hak asasi manusia secara keseluruhan di Myanmar telah memburuk sejak Februari 2021 dan adalah suatu hal yang sangat mendesak untuk membantu Myanmar memperbaiki sistem perlindungan hak asasi manusia dari perspektif kemanusiaan. Di sisi lain, karena ASEAN telah lama mengikuti prinsip non-interferensi, ada konflik kelembagaan tertentu antara *ASEAN Way* dan R2P, yang membuat ASEAN sulit untuk campur tangan secara langsung dalam masalah Myanmar. Pada saat yang sama, Piagam PBB juga menyatakan bahwa PBB tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi hal-hal yang berada dalam yurisdiksi domestik negara

mana pun. Dengan demikian, terdapat kekurangan mekanisme kelembagaan yang sinergis bagi masyarakat internasional dan ASEAN untuk memberikan bantuan kemanusiaan ke Myanmar. Demikian pula dalam masyarakat internasional yang anarkis, implikasi kerja sama keamanan non-tradisional dengan negara tetangga untuk mengatasi krisis Myanmar juga tidak boleh diabaikan.

ASEAN Way telah menjadi titik lemah dalam penanganan krisis di kawasan Asia Tenggara. Blok regional ini dapat mengejar penebusan dan mewujudkan keamanan regional dengan menunjukkan upaya kolektif untuk mengakui kepemimpinan sipil Myanmar, melemahkan kekuasaan junta militer, dan melindungi serta memberikan bantuan kemanusiaan bagi pengungsi, pengungsi internal (IDP), dan migran sejalan dengan hukum internasional yang mendukung rakyat Myanmar.

5. Kesimpulan dan Saran

5.1 Kesimpulan

ASEAN belum berhasil dalam menyelesaikan krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021 karena dua alasan, yaitu sebagai berikut.

- 1) Prinsip non-interferensi. Menteri luar negeri Singapura bahkan menyatakan bahwa “ketidaksetujuan terhadap kudeta ... tidak memberikan izin kepada ASEAN untuk ikut campur.” Indonesia telah mengatakan bahwa ASEAN harus menangani krisis di Myanmar dan bahwa sebagai Ketua ASEAN akan berusaha untuk mendorong terselenggarakannya dialog nasional yang inklusif di Myanmar. Mengingat adanya kendala dan perpecahan internal ASEAN, Indonesia menghadapi perjuangan yang berat.
- 2) Prinsip konsultasi (konsensus). Ada masalah dalam penyesuaian prinsip konsensus di Myanmar, dimana ASEAN harus terus mendorong penyelesaiannya. Sama seperti pembahasan kode tata berperilaku (CoC) di Laut Tiongkok Selatan, tidak ada solusi yang cepat. Isu Myanmar sangat sensitif dan semua langkah yang diambil ASEAN harus menghindari risiko pertumpahan darah warga sipil.

5.2 Saran

Dengan Myanmar yang semakin tidak stabil secara ekonomi dari hari ke hari, mungkin sudah waktunya bagi Tiongkok dan ASEAN untuk membentuk tanggapan bersama terhadap krisis Myanmar yang berkepanjangan. Tiongkok memiliki ikatan yang kuat dengan ASEAN dan terbukti tanggap terhadap kepentingan global ASEAN di masa lalu.

Upaya ASEAN untuk menekan Beijing agar lebih mengurangi dukungannya untuk junta Myanmar mungkin merupakan awal yang baik, terutama karena ketua ASEAN pada tahun 2023, Indonesia, sangat menentang junta.

Ada dua pendekatan yang bisa diambil ASEAN. Pertama, sebagai ketua ASEAN, Indonesia bisa berunding dengan NUG untuk memperluas cakupan legitimasi globalnya sekaligus menggagalkan tipu daya pemerintahan junta Jenderal Senior Min Aung Hlaing untuk keluar dari krisis dengan mengadakan pemilu palsu pada Agustus 2023. Kedua, Tiongkok, Singapura, dan Thailand dapat menggunakan pengaruh ekonominya pada rezim SAC dengan mengancam penghentian kemitraan bisnis dengan industri minyak dan gas Myanmar.

- **Saran Praktis**

Skripsi ini diharapkan bisa menjadi salah satu masukan bagi ASEAN sebagai evaluasi.

- **Saran Akademis**

Saran ilmiah yang bisa dijadikan sumber untuk keberadaan sebuah organisasi regional.

DAFTAR PUSTAKA

Artikel Jurnal

- Manurung, H. (2021). *Myanmar Political Instability: A Threat to Southeast Asia Stability*. *Jurnal Asia Pacific Studies*, Vol. 5, No. 1. DOI: 10.33541/japs.v5i1.2671
- Gassebner, M., Gutmann, J., & Voigt, S. (2016). *When to expect a coup d'état? An extreme bounds analysis of coup determinants*. ILE Working Paper Series, No. 3, University of Hamburg, Institute of Law and Economics (ILE), Hamburg. <http://hdl.handle.net/10419/156099>
- Mahaseth, H. & Tulsyan, A. (2022). *The Myanmar Coup and the Role of ASEAN*. SSRN. <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.4021075>
- Mangir, D.S. & Ramiz, L. (2020). *Indonesia and Regionalism in Southeast Asia, ASEAN and Indonesian Foreign Policy*. *Journal of Academic Perspective on Social Studies*, Vol. 1. <https://doi.org/10.35344/japss.633421>
- Cheak, P. S. F. (2008). *ASEAN's Constructive Engagement Policy Toward Myanmar (Burma)* (Master's thesis). U.S. Army Command and General Staff College.
- Dunst, C. (2021). *The Myanmar Coup as an ASEAN Inflection Point*. *Journal of Indo-Pacific Affairs*. <https://media.defense.gov/2021/Aug/26/2002840264/-1/-1/1/DUNST.PDF>
- Fauziah, S. G. & Padmi, M. F. M. (2022). *The Myanmar Military Coup in 2021 and the Future of Democracy*. *Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal)*, Vol. 5, No. 3. <https://doi.org/10.33258/birci.v5i3.5852>

- King, A. S. (2022). *Myanmar's Coup d'état and the Struggle for Federal Democracy and Inclusive Government*. Religions. Vol. 13, No. 594. <https://doi.org/10.3390/rel13070594>
- Devi, K. S. (2014). *Myanmar under the Military Rule 1962-1988*. International Research Journal of Social Sciences. Vol. 3, No. 10. <http://www.isca.in/IJSS/Archive/v3/i10/8.ISCA-IRJSS-2014-173.pdf>
- Win, S. S. (2019). *Political Development in Myanmar since 2011*. Dagon University Research Journal, Vol. 10. <https://www.dagonuniversity.edu.mm/wp-content/uploads/2019/08/005-IR-San-San-Win-Dr-1.pdf>
- Radtke, K. (2014). *ASEAN Enlargement and Norm Change – A Window of Opportunity for Democracy and Human Rights Entrepreneurs?* Journal of Current Southeast Asian Affairs. Vol. 33, No. 3. <https://doi.org/10.1177/186810341403300304>
- Thida, H. M. (2021). *People's Perception of the Role of Foreign Power in Myanmar: A Case Study of the 2021 Military Coup*. Foreign Policy Review, Vol. 14, No. 3. <https://doi.org/10.47706/KKIFPR.2021.3.127-140>
- Seethi, K. M. (2021). *Military coup in Myanmar: 'Garrison State' back to dismantle democracy?* Global South Colloquy, <https://doi.org/10.6084/m9.figshare.13697578.v1>
- Marsteintredet, L. & Malamud, A. (2019). *Coup with Adjectives: Conceptual Stretching or Innovation in Comparative Research?* Political Studies Association. Vol. 68, No. 4. <https://doi.org/10.1177/0032321719888857>
- Herindrasti, V. L. S. (2010). *ASEAN Role and Regionalism in Southeast Asia*. Sociae Polites: Majalah Ilmiah Sosial Politik. Vol. 11, No. 31. <https://doi.org/10.33541/sp.v11i31.675>
- Tekunan, S. (2015). *The Asean Way: The Way To Regional Peace?* Jurnal Hubungan Internasional. Vol. 3, No. 2. <https://doi.org/10.18196/hi.2014.0056.142-147>

Leonard, A. E. (2019). *The ASEAN Way to Asia-Pacific Security Community*. Jurnal Sentris Kelompok Studi Mahasiswa Pengkaji Masalah Internasional. Vol. 1, No. 1. <https://doi.org/10.26593/sentris.v1i1.4162.22-31>

Kim, H. J. (2007). *ASEAN Way and Its Implications and Challenges for Regional Integration in Southeast Asia*. Journal of Southeast Asian Studies. Vol. 12.

Artikel Online

Human Rights Watch. (2022, 22 April). *Myanmar: ASEAN's Failed '5-Point Consensus' a Year On*. <https://www.hrw.org/news/2022/04/22/myanmar-aseans-failed-5-point-consensus-year>

The Irrawaddy. (2021, 27 Juli). *Myanmar Junta Officially Annuls NLD's 2020 Election Win*. <https://www.irrawaddy.com/news/burma/myanmar-junta-officially-annuls-nlds-2020-election-win.html>

Aljazeera. (2020, 13 November). *Aung San Suu Kyi's party confirmed winner in Myanmar election*. <https://www.aljazeera.com/news/2020/11/13/aung-san-suu-kyis-party-confirmed-winner-in-myanmar-election>

Reuters. (2021, 21 Oktober). *ASEAN should rethink non-interference policy amid Myanmar crisis, Malaysia FM says*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/asean-should-rethink-non-interference-policy-amid-myanmar-crisis-malaysia-fm-2021-10-21/>

United Nations. (2017, 11 September). *UN human rights chief points to 'textbook example of ethnic cleansing' in Myanmar*. <https://news.un.org/en/story/2017/09/564622-un-human-rights-chief-points-textbook-example-ethnic-cleansing-myanmar>

- Council on Foreign Relations (CFR). (2022, 11 April). *What is ASEAN?* <https://www.cfr.org/backgrounder/what-asean>
- Council on Foreign Relations (CFR). (2022, Februari). *The Revival of Military Rule in South and Southeast Asia*. <https://www.cfr.org/report/revival-military-rule-south-and-southeast-asia>
- Hazmi, A. (2020, 21 Januari). *What is "ASEAN Way"?* Good News from Southeast Asia. <https://seasia.co/2020/01/21/what-is-asean-way>
- Molthof, M. (2012, 8 Februari). *ASEAN and the Principle of Non-Interference*. E-International Relations. <https://www.e-ir.info/2012/02/08/asean-and-the-principle-of-non-interference/>
- Nguyen, H. H. (2012, 27 Juli). *Time to reinterpret ASEAN's consensus principle*. East Asia Forum. <https://www.eastasiaforum.org/2012/07/27/time-to-reinterpret-asean-s-consensus-principle/>
- Clare, A. (2021, 2 Juli). *The Myanmar coup: a quick guide*. Parliament of Australia. https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp2122/Quick_Guides/MyanmarCoup
- Goodman, J. (2021, 5 Februari). *Myanmar coup: Does the army have evidence of voter fraud?* BBC. <https://www.bbc.com/news/55918746>
- Reuters. (2022, 25 Januari). *Myanmar's year of turmoil since the military took power in a coup*. <https://www.reuters.com/world/asia-pacific/myanmars-year-turmoil-since-military-took-power-coup-2022-01-25/>
- Reuters. (2019, 25 Januari). *Myanmar army chief must be prosecuted for Rohingya 'genocide': U.N. rights envoy*. <https://www.reuters.com/article/us-myanmar-rohingya-un-idUSKCN1PJ1AK>

- Kumbun, J. (2021, 18 Februari). *Myanmar's fundamental problem: the 2008 constitution*. Asia Times. <https://asiatimes.com/2021/02/myanmars-fundamental-problem-the-2008-constitution/>
- Sun, Y. (2022, 1 Februari). *One year after Myanmar's coup, old and new resistance is undermined by divisions*. Brookings. <https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2022/02/01/one-year-after-myanmars-coup-old-and-new-resistance-is-undermined-by-divisions/>
- Thuzar, M. (2021, 20 Oktober). *Commentary: Is ASEAN's snub to Myanmar military the start of a new approach?* Channel News Asia. <https://www.channelnewsasia.com/commentary/asean-myanmar-protest-military-government-nug-sac-min-aung-hlaing-un-2254311>
- BBC. (2021, 6 Desember). *Aung San Suu Kyi: Myanmar democracy icon who fell from grace*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-pacific-11685977>
- Maizland, L. (2022, 31 Januari). *Myanmar's Troubled History: Coups, Military Rule, and Ethnic Conflict*. Council on Foreign Relations. <https://www.cfr.org/backgrounder/myanmar-history-coup-military-rule-ethnic-conflict-rohingya>
- Ryu, Y., Minn, B., & Mon, M. M. (2021, 10 Maret). *The Military Coup in Myanmar: Time to Prioritise ASEAN Centrality and Communal Values*. ISEAS Yusof Ishak Institute. <https://www.iseas.edu.sg/articles-commentaries/iseas-perspective/2021-27-the-military-coup-in-myanmar-time-to-prioritise-asean-centrality-and-communal-values-by-yongwook-ryu-bernard-minn-and-myat-mon/>
- Nouwens, V. & Dave, A. (2021, 2 Februari). *Myanmar's Military Coup: International Reactions*. RUSI. <https://rusi.org/explore-our-research/publications/commentary/myanmars-military-coup-international-reactions>

- Banerjee, S. (2022, 7 Juni). *The Myanmar crisis: Escalating humanitarian emergencies*. Observer Research Foundation. <https://www.orfonline.org/expert-speak/the-myanmar-crisis-escalating-humanitarian-emergencies/>
- European Institute for Asian Studies (EIAS). (2021, 17 Agustus). *Myanmar's humanitarian crisis: What role for the international community?* <https://eias.org/policy-briefs/myanmars-humanitarian-crisis-what-role-for-the-international-community/>
- BBC. (2021, 1 Februari). *Myanmar coup: Min Aung Hlaing, the general who seized power*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-55892489>
- Sullivan, D. (2021, 21 Oktober). *Dire Consequences: Addressing the Humanitarian Fallout from Myanmar's Coup*. Refugees International. <https://www.refugeesinternational.org/reports/2021/10/18/dire-consequences-addressing-the-humanitarian-fallout-from-myanmars-coup>
- Mezzerla, M. (2021, 4 Mei). *A Closer Look at 5 Regional Responses to the Myanmar Coup*. Clingendael Spectator. <https://spectator.clingendael.org/en/publication/closer-look-5-regional-responses-myanmar-coup>
- BBC. (2021, 11 Februari). *Myanmar coup: US announces sanctions on leaders*. <https://www.bbc.com/news/world-asia-56015749>
- Adkins, W. (2021, 1 Februari). *EU leaders condemn military coup in Myanmar*. Politico. <https://www.politico.eu/article/europe-reacts-to-myanmar-military-coup/>
- DW. (2021, 22 Maret). *EU imposes sanctions in response to Myanmar coup*. <https://www.dw.com/en/eu-imposes-sanctions-in-response-to-myanmar-coup/a-56948456>

- Min, M. (2022, 22 Maret). *India's cautious approach to the military coup in Myanmar*. East Asia Forum. <https://www.easiaforum.org/2022/03/22/indias-cautious-approach-to-the-military-coup-in-myanmar/>
- The Straits Times. (2021, 8 Mei). *Myanmar junta designates shadow government as a 'terrorist' group*. <https://www.straitstimes.com/asia/se-asia/myanmar-junta-designates-shadow-government-as-a-terrorist-group>
- Hein, Y. M. (2022). *The Root Causes of Myanmar's Coup Go Deeper*. Wilson Center. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/2022-03-Myanmar_YeMyoHein.pdf
- Hein, Y. M. (2022). *One Year On: The Momentum of Myanmar's Armed Rebellion*. Wilson Center. https://www.wilsoncenter.org/sites/default/files/media/uploads/documents/ASIA_220519_1YearOn-BRIEF_V1r2.pdf
- Congressional Research Service. (2021, 12 Mei). *Coup in Burma: Implications for Congress*. <https://sgp.fas.org/crs/row/R46792.pdf>
- Banerjee, S. & Bhowmick, S. (2022, 15 Juni). *Myanmar: Coup, COVID-19, and the ongoing economic crisis*. Observer Research Foundation (ORF). <https://www.orfonline.org/expert-speak/coup-covid-19-and-the-ongoing-economic-crisis/>
- Nadi, K. (2022, 19 Mei). *How ASEAN's Failed 'Five-Point Consensus' Has Let Down the People of Myanmar*. The Wire. <https://thewire.in/south-asia/how-aseans-failed-five-point-consensus-has-let-down-the-people-of-myanmar>
- Sulaeman, F. H. (2021, 1 Juli). *Versailles in Repeat: The Failure of ASEAN's Five-Point Consensus. Modern Diplomacy*. <https://moderndiplomacy.eu/2021/07/01/versailles-in-repeat-the-failure-aseans-five-point-consensus/>

- Houston, K. (2022, 11 Oktober). *Qualitative data-collection methods*. Jotform. <https://www.jotform.com/blog/qualitative-data-collection-methods/>
- Aljazeera. (2022, 3 Agustus). *Why is the Myanmar crisis such a challenge for ASEAN?* <https://www.aljazeera.com/news/2022/8/3/why-is-the-myanmar-crisis-such-a-challenge-for-asean>
- Aljazeera. (2022, 11 November). *Southeast Asia leaders struggle with Myanmar crisis at summit*. <https://www.aljazeera.com/news/2022/11/11/southeast-asia-leaders-struggle-with-myanmar-crisis-at-summit>
- Aljazeera. (2022, 28 Oktober). *Myanmar warns ASEAN that pressure would be counterproductive*. <https://www.aljazeera.com/news/2022/10/28/myanmar-warns-asean-that-pressure-for-peace-is-counterproductive>
- Chan, D. S. W. (2021, 2 September). *Business as Usual: Chinese Investments After the Myanmar Coup*. The Diplomat. <https://thediplomat.com/2021/09/business-as-usual-chinese-investments-after-the-myanmar-coup/>
- Radio Free Asia (RFA). (2023, 22 Februari). *India is keeping close ties with Myanmar, even transferring weapons, NGOs say*. <https://www.rfa.org/english/news/myanmar/india-burma-02222023180530.html>
- Ministry of Foreign Affairs of the People's Republic of China. (2021, 8 Juni). *Wang Yi Meets with Myanmar's Foreign Minister U Wunna Maung Lwin*. https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/gjhdq_665435/2675_665437/2747_66349_8/2749_663502/202106/t20210609_9168709.html
- Byrd, M. (2023, 1 Februari). *Myanmar Economy in Tailspin, 2 Years after the Military Coup*. Daniel K. Inouye Asia-Pacific Center for Security Studies. <https://dkiapcss.edu/myanmar-economy-in-tailspin-2-years-after-the-military-coup/>

- Ruggi, T. (2023, 19 Februari). *Which Way for the 'ASEAN Way': The Myanmar Coup and ASEAN's Response*. The Yale Review of International Studies. <http://yris.yira.org/comments/5993>
- Cote, C. (2021, 9 November). *What is Descriptive Analytics? 5 Examples*. Harvard Business School Online. <https://online.hbs.edu/blog/post/descriptive-analytics>
- QuestionPro. *Qualitative Data – Definition, Types, Analysis and Examples*. <https://www.questionpro.com/blog/qualitative-data/>
- Rev. (2022, 30 Maret). *How to Analyze Interview Transcripts in Qualitative Research*. <https://www.rev.com/blog/transcription-blog/analyze-interview-transcripts-in-qualitative-research>
- United Nations. (2022, 25 Juli). *Myanmar junta's execution of four democracy activists condemned by UN*. <https://news.un.org/en/story/2022/07/1123172>
- Amnesty International. (2023, 24 April). *Myanmar: ASEAN needs to address its failing approach to the crisis in Myanmar following the military coup*. <https://www.amnesty.org/en/documents/asa16/6687/2023/en/>
- CNN Indonesia. (2023, 15 Mei). *Junta Myanmar Bakar Hidup-hidup 19 Warga saat KTT ASEAN Digelar*. <https://www.cnnindonesia.com/internasional/20230515095401-106-949570/junta-myanmar-bakar-hidup-hidup-19-warga-saat-ktt-asean-digelar>
- Anwar, L. A. (2023, 19 April). *ASEAN is Increasingly Important and Needed*. Kompas. <https://www.kompas.id/baca/english/2023/04/19/asean-is-increasingly-important-and-needed>

Policy Paper

Centre for Strategic and International Studies (CSIS) Pakarti Centre. (2022, Oktober). *Seeking Strategic Options for Myanmar: Reviewing Five-Point Consensus and Anticipating the Future of Democracy in Myanmar*.

Roza, R. (2021, Februari). *Military Coup in Myanmar: A Test for ASEAN*. Info Singkat: A Brief Study of Actual and Strategic Studies. https://berkas.dpr.go.id/puslit/files/info_singkat/Info%20Singkat-XIII-4-II-P3DI-Februari-2021-244-EN.pdf

Passeri, A. (2021). *The Domestic and International Implications of Myanmar's 2021 Military Coup*. IKMAS Working Paper 1/2021. <https://www.ukm.my/ikmas/wp-content/uploads/2021/09/IKMAS-Working-Paper-2021-Passeri-Myanmar-Full-Version.pdf>

Marchi, L. (2014). *ASEAN vis-à-vis Myanmar: what influences at play?* The London School of Economics and Political Science, Centre for International Studies. <http://eprints.lse.ac.uk/id/eprint/64792>

Buku

Creswell, J. W. (2014). *Research Design: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*. SAGE Publications, Inc. https://fe.unj.ac.id/wp-content/uploads/2019/08/Research-Design_Qualitative-Quantitative-and-Mixed-Methods-Approaches.pdf

Muller, A. R. (2004). *The Rise of Regionalism: Core Company Strategies under the Second Wave of Integration*. Erasmus Research Institute of Management (ERIM).

RIWAYAT HIDUP



I am an undergraduate International Relations student of UPN Veteran Jakarta. I am skilled in article writing and research. I also interested in learning new skills.

Raynor Argaditya

Experience

- Intern at the Directorate of Europe I of the Ministry of Foreign Affairs of the Republic of Indonesia (December 2022-February 2023)
- Staff of Research and Development (RnD) at Diplomacy Lab FISIP UPN Veteran Jakarta (August 2021-August 2022)
- Intern at the Directorate of Defense International Cooperation of the Ministry of Defense of the Republic of Indonesia (January 2022-February 2022)
- Research Assistant Intern at Reviewnesia (September 2021-October 2021)

Volunteering

- Runner of the Conference on Indonesian Foreign Policy (CIFP) 2022 (November 2022)
- Independent Team of Pemilihan Raya FISIP UPN Veteran Jakarta 2021 (November 2021)

Education

- Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta, Faculty of Social and Political Sciences (FISIP), Bachelor's degree, Department of International Relations (August 2019-May 2023)
- Sekolah Menengah Atas Negeri 2 Depok (2016-2019)

Achievements

- Top 14 Essay (Shorlisted in the Competition) in 2022 Essay Writing Competition for Undergraduate Students on Critical Human Rights and Peace Issues in ASEAN/Southeast Asia - ASEAN University Network-Human Rights Education (AUN-HRE) (October 2022)
- Outstanding Student Nomination FISIP UPN Veteran Jakarta 2021 (November 2021)
- Passed the Student Creativity Program (PKM) on Scientific Articles 2021 (July 2021)

Skills

- English
- Indonesian
- Teamwork
- Time Management

- Leadership
- Communications
- Research
- Article Writing
- Web Content Writing
- Basic Video Editing

Contact

- Home Address: Perumahan Jatijajar Blok D21/12A, Jalan Raya Bogor, Tapos, Depok, West Java
- Phone Number: +62 812 1134 3530
- Email Address: raynor.arga@gmail.com
- LinkedIn:
<https://www.linkedin.com/in/raynor-argaditya-379a941b2/>
- Instagram:
https://www.instagram.com/raynor_argaditya/

Lampiran 1 Transkrip Wawancara

A. Narasumber 1



Nama : Laurentius Amrih Jinangkung, S.H., LL.M.
Jabatan : Direktur Jenderal Hukum dan Perjanjian Internasional
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Waktu : 15 Februari 2023, 15.30
Tempat : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang menyebabkan terjadinya krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021?	Negara Myanmar memiliki proses <i>nation-building</i> yang belum selesai hingga saat ini. Terdapat berbagai kelompok etnis minoritas yang memberontak dan ingin memisahkan diri dari Myanmar karena perlakuan

		buruk dari etnis mayoritas Bamar.
2.	Apa yang menyebabkan posisi junta militer Myanmar begitu kuat?	Karena ingin terus berkuasa atau menolak untuk terlibat dalam pembagian kekuasaan (<i>power-sharing</i>).
3.	Bagaimana selama ini ASEAN memandang krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021?	ASEAN bisa menyelesaikan krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021 jika pihak Myanmar terbuka untuk diajak berunding.
4.	Melihat hasil pencapaian dari penyelesaian krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021, apakah yang menyebabkan ASEAN kurang optimal dalam menyelesaikan krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021? Apakah prinsip <i>non-interference</i> dan konsensus bisa dijadikan alasan?	Prinsip <i>non-interference</i> sendiri bisa dijadikan alasan, karena dengan prinsip ini, menyiratkan bahwa ASEAN seolah-olah tidak memiliki kewajiban terhadap Myanmar.
5.	Kenapa ASEAN tidak menanggukhan keanggotaan Myanmar?	Karena ASEAN lebih menyukai cara <i>engagement</i> untuk menyelesaikan masalah Myanmar.
6.	Kira-kira apa yang menyebabkan junta militer Myanmar tidak mau berunding dengan oposisi Myanmar?	-
7.	Apakah prinsip <i>non-interference</i> dan konsensus ASEAN perlu direvisi untuk	-

	mencegah krisis yang sama di negara anggota ASEAN lainnya?	
8.	Apa yang harus dilakukan Indonesia selaku Ketua ASEAN di tahun 2023 ini, agar bisa membantu menyelesaikan konflik politik di Myanmar?	Indonesia bisa mengadakan dialog, meskipun tidak mudah, mengingat penyelesaian membutuhkan waktu bertahun-tahun.
9.	Bagaimana peran ASEAN dalam menangani krisis politik Myanmar?	ASEAN mengangkat Utusan Khusus untuk Myanmar yang negara asalnya sesuai dengan ketua ASEAN tahun 2021 dan 2022 secara berturut-turut, yaitu Erywan Yusuf dan Prak Sokhonn.
10.	Apa faktor internal dan eksternal penyebab kegagalan ASEAN?	-

B. Narasumber 2



Nama : Rheinhard Sinaga
Jabatan : *Counsellor-Diplomat Madya* Badan Strategi Kebijakan Luar Negeri (BSKLN) Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Waktu : 20 Februari 2023, 10.00
Tempat : Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia

No	Pertanyaan	Jawaban
1.	Apa yang menyebabkan terjadinya krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021?	Amandemen konstitusi Myanmar yang mengurangi porsi anggota militer Myanmar di parlemen nasional.
2.	Apa yang menyebabkan posisi junta militer Myanmar begitu kuat?	Tatmadaw (angkatan bersenjata Myanmar) punya sejarah yang beriringan dengan pendirian negara Myanmar pada tahun 1948. Oleh sebab itu, Tatmadaw sangat ditakuti.
3.	Bagaimana selama ini ASEAN memandang krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021?	Seiring dengan gagalnya <i>Five-Point of Consensus</i> (5PC), dalam KTT ASEAN yang diadakan pada November 2022 di Phnom Penh, Kamboja, blok regional ini sedang mempertimbangkan pendekatan lain.

4.	Melihat hasil pencapaian dari penyelesaian krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021, apakah yang menyebabkan ASEAN kurang optimal dalam menyelesaikan krisis politik pasca-kudeta militer Myanmar 2021? Apakah prinsip <i>non-interference</i> dan konsensus bisa dijadikan alasan?	-
5.	Kenapa ASEAN tidak menanggukkan keanggotaan Myanmar?	Penanggukan keanggotaan Myanmar di ASEAN bukanlah solusi yang tepat. Seharusnya pihak ASEAN harus melakukan <i>engagement</i> dengan junta Myanmar.
6.	Kira-kira apa yang menyebabkan junta militer Myanmar tidak mau berunding dengan oposisi Myanmar?	Karena belum ada situasi yang kondusif sebagai upaya membangun kepercayaan (<i>confidence-building measures/CBM</i>) antara militer dan otoritas sipil.
7.	Apakah prinsip <i>non-interference</i> dan konsensus ASEAN perlu direvisi untuk mencegah krisis yang sama di negara anggota ASEAN lainnya?	Ada potensi amandemen Piagam ASEAN di bagian <i>non-interference</i> .
8.	Apa yang harus dilakukan Indonesia selaku Ketua ASEAN di tahun 2023 ini, agar bisa membantu	Isu Myanmar menjadi tantangan dalam Keketuaan ASEAN 2023 yang dijabat

	menyelesaikan konflik politik di Myanmar?	oleh Indonesia. Pemerintah RI sendiri bisa berbagi pengalaman restrukturisasi ABRI pasca runtuhnya rezim Orde Baru agar bisa menjadi teladan untuk diikuti oleh junta Myanmar.
9.	Bagaimana peran ASEAN dalam menangani krisis politik Myanmar?	ASEAN perlu menggunakan suatu “ide kreatif” untuk menemukan jalan tengah dalam isu Myanmar, yaitu <i>homegrown democracy</i> , sehingga mampu menghindari berdirinya pemerintahan demokrasi ala Barat di Myanmar.
10.	Apa faktor internal dan eksternal penyebab kegagalan ASEAN?	-

C. Narasumber 3

Nama : Ronald E. Tundang

Jabatan : Pendiri Peta Kebijakan

Waktu : 25 Februari 2023, 18.30

Tempat : Situ Gunung Suspension Bridge, Gede Pangrango, Jl. Kadudampit, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat 43153

Menurut Bapak Ronald, mengingat Myanmar termasuk sebagai salah satu negara kurang berkembang (*Least Developed Country/LDC*) di ASEAN, ASEAN seharusnya melakukan embargo ekonomi terhadap Myanmar, khususnya ekspor minyak mentah; langkah ini dipercaya mampu memengaruhi

perilaku pemerintahan junta Min Aung Hlaing yang kaku dan berpikiran sempit agar mengurangi represinya terhadap warga dan masyarakat sipil Myanmar. Langkah serupa sebenarnya pernah diterapkan oleh Arab Saudi pada penjualan minyaknya ke AS pada tahun 1973, ketika terjadi Perang Yom Kippur antara koalisi Arab melawan Israel yang didukung oleh AS dan sekutunya.

Lampiran 2 Bukti Pemeriksaan Turnitin

Raynor Argaditya_1910412035_Skripsi (untuk dicek turnitin)

ORIGINALITY REPORT

12% SIMILARITY INDEX
12% INTERNET SOURCES
1% PUBLICATIONS
5% STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
2	www.scribd.com Internet Source	1%
3	docplayer.info Internet Source	<1%
4	journal.aihi.or.id Internet Source	<1%
5	Submitted to Okaloosa-Walton Community College Student Paper	<1%
6	adoc.pub Internet Source	<1%
7	www.liputan6.com Internet Source	<1%
8	chanelmuslim.com Internet Source	<1%
9	Submitted to University of Essex Student Paper	<1%

Lampiran 3 Surat Riset



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
Jalan Rumah Sakit Fatmawati, Pondok Labu, Jakarta Selatan 12450
Telepon 021 - 7656971, Fax. 021 - 7656904
Laman : www.upnvj.ac.id, e-mail upnvj@upnvj.ac.id

Nomor : 066 /UN61/RS/FISIP/2023 18 Januari 2023
Hal : Permohonan Riset

Yth. Bapak Laurentius Amrih Jinangkung, S.H., LL.M.
Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia
Jalan Pejambon No. 6, Jakarta Pusat 10110

Berkaitan dengan program pemerintah di bidang Pendidikan dalam mewujudkan keterkaitan dan kesepadanan (*link and match*) antara pendidikan dengan dunia usaha, maka Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UPN "Veteran" Jakarta mewajibkan mahasiswa yang akan menyelesaikan studinya mengikuti Riset di instansi pemerintah maupun swasta.

Oleh karena itu kami mengajukan untuk dapat kiranya mahasiswa/i kami melaksanakan Riset di Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia yang Bapak pimpin.

Adapun mahasiswa/i yang kami maksud adalah:

Nama : Raynor Argaditya
NIM : 1910412035
Program Studi : S1 Hubungan Internasional
Alamat : Perumahan Jatijajar Blok D21/12A, Jatijajar, Tapos, Jl. Raya Bogor,
Depok, Jawa Barat 16457
Telepon / Hp : 081211343530
Judul : Kegagalan ASEAN dalam Menyelesaikan Krisis Politik Pasca-Kudeta
Militer Myanmar 2021

Demikian permohonan ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.

a.n. DEKAN
Wakil Dekan Bidang Akademik

Dr. KUSUMAJANTI
NIP 197103222021212002

Tembusan:
Dekan FISIP UPNVJ (sebagai laporan)

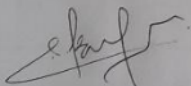

Lampiran 4 Lembar Persetujuan Sidang Skripsi

LEMBAR PERSETUJUAN SIDANG SKRIPSI

Skripsi diajukan oleh:

Nama : Raynor Argaditya
NIM : 1910412035
Program Studi : Hubungan Internasional
Judul Skripsi : Kegagalan ASEAN dalam Menyelesaikan Krisis Politik Pasca-Kudeta Militer Myanmar 2021

Telah berhasil melakukan bimbingan minimal 6X dihadapan dosen pembimbing diterima sebagai bagian persyaratan untuk melakukan sidang **SKRIPSI** yang diperlukan untuk memperoleh gelar Sarjana, pada Program Studi Ilmu Hubungan Internasional Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.

Pembimbing I	Pembimbing II
	
(Dr. Asep Kamaluddin Nashir, S.Ag, M.Si.)	(Hesti Rosdiana, S.Sos, M.Si.)

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 3 Januari 2023

Lampiran 5 Kontrak Penulisan Skripsi

Kontrak Penulisan Skripsi

Saya yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan dengan sungguh-sungguh akan melaksanakan proses pembimbingan skripsi secara tertib, terfokus dan menyelesaikan penulisan skripsi selambat-lambatnya enam bulan, terhitung sejak penandatanganan kontrak ini

Jakarta, 30 November 2020

Pembimbing Utama

(D. Hap Komalaha)
Nashir, S.H., M.S

Ketua Program Studi


(M. Karim)

Yang Menyatakan

(Rahmawati)
Rahmawati Nugadhy

Hakikat Penulisan Skripsi

1. Penulisan Skripsi pada hakikatnya adalah kegiatan ilmiah untuk melatih mahasiswa berpikir tertib, logis dan metodis
2. Penulisan Skripsi pada hakikatnya adalah kewajiban akademis yang penyelesaiannya menjadi tanggung jawab penuh mahasiswa
3. Jalin Komunikasi pembimbingan yang intensif dengan pembimbing anda untuk kecepatan dan ketepatan penulisan skripsi
4. Skripsi merupakan karya ilmiah hasil penelitian mandiri yang terbebas dari tindakan plagiat
5. Segala bentuk plagiarisme dalam penulisan skripsi merupakan pelanggaran akademik dan akan dikenai sanksi sesuai aturan yang berlaku


KARTU BIMBINGAN SKRIPSI

JADWAL BIMBINGAN	Pemb. Utama	Hari / Pukul
	Pemb. Pendamping	Hari / Pukul
Nama	Rahmawati Nugadhy	
NIM	1015212025	
Program Studi	Hubungan Internasional	
Konentrasi	ORIENTASIONAL	
Telepon / HP		
Pembimbing Utama	Dr. Hap Komalaha Nashir, S.H., M.S	
Pembimbing Pendamping	Heti Paksi, S. Soc., M.S	
Judul	Keagungan ASEAN dalam Menangani Krisis Politik Pasca-Kabeh Myanmar 2021	

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA

Lampiran 6 Kartu Penulisan Skripsi

Selesaikan Skripsi anda dalam 1 (satu) Semester
 Mulai Bimbingan Tanggal : 19 September 2022

BAB I			
Tanggal	Kegiatan Bimbingan	Paraf	
		Pemb. I	Pemb. II
19/09/22	Penentuan Judul		
15/10/22	Membahas Outline → Revisi Judul		
25/10/22	Revisi Rumusan Masalah, Label, Tujuan penelitian, Teori → Regulasi		
1/11/22	Revisi Latar Belakang		
10/11/22	Revisi Label dan Masalah		

BAB II			
Tanggal	Kegiatan Bimbingan	Paraf	
		Pemb. I	Pemb. II
1/11/2022	Tambah tujuan pustaka menjadi 10		
9/11/2022	Revisi Konsep dan Teori		
28/11/2022	Pendekatan kerangka dipindah ke Bab I		

BAB III			
Tanggal	Kegiatan Bimbingan	Paraf	
		Pemb. I	Pemb. II
1/11/2022	Tambah metodologi penelitian		

BAB IV			
Tanggal	Kegiatan Bimbingan	Paraf	
		Pemb. I	Pemb. II
02/04/2023	Hasil wawancara ditulis di footnote terbalik		
05/04/2023	Home nursing ditulis di footnote		
04/01/2023	Membuktikan referensi ASEAN Way		
27/04/2023	Membuktikan Peran ASEAN & Regulasi SPC		
03/04/2023	Mengajukan ulang poin SPC		
14/04/2023	Merevisi abstrak dan Bab III		

BAB V			
Tanggal	Kegiatan Bimbingan	Paraf	
		Pemb. I	Pemb. II
27/03/2023	Membuktikan saran praktis dan saran kebijakan		
03/04/2023	Revisi abstrak		

BAGIAN	BULAN KE :											
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
BAB I	○	○										
BAB II		○										
BAB III		○										
BAB IV			○	○	○							
BAB V				○	○							

(Beri tanda ○ pada kolom bulan sesuai kemajuan)

Raynor Argaditya

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

2%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

repository.upnvj.ac.id

Internet Source

3%

2

Submitted to State Islamic University of
Alauddin Makassar

Student Paper

1%

3

dspace.uii.ac.id

Internet Source

1%

4

www.scribd.com

Internet Source

<1%

5

es.scribd.com

Internet Source

<1%

6

etheses.uin-malang.ac.id

Internet Source

<1%

7

journal.aihii.or.id

Internet Source

<1%

8

repository.pelitabangsa.ac.id:8080

Internet Source

<1%

9

adoc.pub

Internet Source

<1%

10	sainsma.com Internet Source	<1 %
11	www.researchgate.net Internet Source	<1 %
12	etd.repository.ugm.ac.id Internet Source	<1 %
13	cprindia.org Internet Source	<1 %
14	laclomanatutodili.blogspot.com Internet Source	<1 %
15	ejournal.fisip.unjani.ac.id Internet Source	<1 %
16	lp2m.uma.ac.id Internet Source	<1 %
17	text-id.123dok.com Internet Source	<1 %
18	Submitted to Infile Student Paper	<1 %
19	Submitted to Myanmar Imperial College Student Paper	<1 %
20	Submitted to Politeknik Negeri Jakarta Student Paper	<1 %
21	katadata.co.id Internet Source	<1 %

22	Submitted to Universitas Airlangga Student Paper	<1 %
23	Submitted to Universitas Pendidikan Indonesia Student Paper	<1 %
24	core.ac.uk Internet Source	<1 %
25	archive.org Internet Source	<1 %
26	id.123dok.com Internet Source	<1 %
27	www.mistar.id Internet Source	<1 %
28	repository.unisba.ac.id Internet Source	<1 %
29	Submitted to Australian National University Student Paper	<1 %
30	kemlu.go.id Internet Source	<1 %
31	staging2.dqlab.id Internet Source	<1 %
32	www.bbc.com Internet Source	<1 %
33	www.liputan6.com	

Internet Source

<1 %

34

Submitted to UIN Walisongo

Student Paper

<1 %

35

eprints.undip.ac.id

Internet Source

<1 %

36

asiatoday.id

Internet Source

<1 %

37

docplayer.info

Internet Source

<1 %

38

freedomfchs.com

Internet Source

<1 %

39

intisari.grid.id

Internet Source

<1 %

40

real-j.mtak.hu

Internet Source

<1 %

41

repository.uki.ac.id

Internet Source

<1 %

42

nogetsvar.com

Internet Source

<1 %

43

www.msn.com

Internet Source

<1 %

44

ivanistheoptimusprime.blogspot.com

Internet Source

<1 %

45	repository.ub.ac.id Internet Source	<1 %
46	e-journal.uajy.ac.id Internet Source	<1 %
47	eprints.unisnu.ac.id Internet Source	<1 %
48	guruppkn.com Internet Source	<1 %
49	id.scribd.com Internet Source	<1 %
50	orator.id Internet Source	<1 %
51	repository.umj.ac.id Internet Source	<1 %
52	www.ircorner.com Internet Source	<1 %
53	Submitted to Winston Churchill Middle School Student Paper	<1 %
54	anhyhandayaniunismuh12.blogspot.com Internet Source	<1 %
55	duta.co Internet Source	<1 %
56	ejournal.balitbangham.go.id Internet Source	<1 %

57	www.cnbcindonesia.com Internet Source	<1 %
58	mathlaulanwar.or.id Internet Source	<1 %
59	mediaindonesia.com Internet Source	<1 %
60	news.tigi.co.id Internet Source	<1 %
61	repository.unib.ac.id Internet Source	<1 %
62	www.cnnindonesia.com Internet Source	<1 %
63	www.yousosial.com Internet Source	<1 %
64	Submitted to Universitas Riau Student Paper	<1 %
65	repository.umsu.ac.id Internet Source	<1 %
66	www.balebengong.net Internet Source	<1 %
67	www.greelane.com Internet Source	<1 %
68	www.kompas.com Internet Source	<1 %

69	www.voaindonesia.com Internet Source	<1 %
70	digilib.uin-suka.ac.id Internet Source	<1 %
71	www.mdpi.com Internet Source	<1 %
72	www.timesindonesia.co.id Internet Source	<1 %
73	akurat.co Internet Source	<1 %
74	chanelmuslim.com Internet Source	<1 %
75	dkiapcss.edu Internet Source	<1 %
76	e-repository.perpus.iainsalatiga.ac.id Internet Source	<1 %
77	ekonomi.bisnis.com Internet Source	<1 %
78	eprints.umm.ac.id Internet Source	<1 %
79	hukum.uma.ac.id Internet Source	<1 %
80	ipdefenseforum.com Internet Source	<1 %

81	journal.unifa.ac.id Internet Source	<1 %
82	repository.unika.ac.id Internet Source	<1 %
83	voi.id Internet Source	<1 %
84	5g.wilsoncenter.org Internet Source	<1 %
85	amaliamastur-fisip13.web.unair.ac.id Internet Source	<1 %
86	apdf-magazine.com Internet Source	<1 %
87	id.noordermarketing.com Internet Source	<1 %
88	jagokata.com Internet Source	<1 %
89	lp2m.iai-tribakti.ac.id Internet Source	<1 %
90	manajemenpertanahan.blogspot.com Internet Source	<1 %
91	mmaimages.blogspot.com Internet Source	<1 %
92	noviawati-lesmana-fisip15.web.unair.ac.id Internet Source	<1 %

93	repository.ar-raniry.ac.id Internet Source	<1 %
94	repository.uinsaizu.ac.id Internet Source	<1 %
95	www.idntimes.com Internet Source	<1 %
96	www.tribunnews.com Internet Source	<1 %
97	"Indonesia", Walter de Gruyter GmbH, 2021 Publication	<1 %
98	Sri Lina Betty Lamsihar Simorangkir, Yonatan Alex Arifianto. "Makna Hidup Adalah Kristus Berdasarkan Filipi 1 : 21 Dan Implikasinya Bagi Orang Percaya", CARAKA: Jurnal Teologi Biblika dan Praktika, 2020 Publication	<1 %
99	Submitted to Sriwijaya University Student Paper	<1 %
100	api.research-repository.uwa.edu.au Internet Source	<1 %
101	ilhamridlo-fkm.web.unair.ac.id Internet Source	<1 %
102	imbalo.wordpress.com Internet Source	<1 %

103	journal.unpar.ac.id Internet Source	<1 %
104	m.mediaindonesia.com Internet Source	<1 %
105	portalhi.web.id Internet Source	<1 %
106	repo.unand.ac.id Internet Source	<1 %
107	repository.ibs.ac.id Internet Source	<1 %
108	repository.uma.ac.id Internet Source	<1 %
109	repository.unhas.ac.id Internet Source	<1 %
110	roysianipar.wordpress.com Internet Source	<1 %
111	sfcitrix.surdna.org Internet Source	<1 %
112	sinarnusantaranews.com Internet Source	<1 %
113	tirto.id Internet Source	<1 %
114	www.antaranews.com Internet Source	<1 %

115	www.cakaplah.com Internet Source	<1 %
116	www.diva-portal.org Internet Source	<1 %
117	www.dw.com Internet Source	<1 %
118	www.hariansib.com Internet Source	<1 %
119	www.hebergementwebs.com Internet Source	<1 %
120	www.iises.net Internet Source	<1 %
121	www.kaskus.co.id Internet Source	<1 %
122	www.republika.id Internet Source	<1 %
123	journal.uin-alauddin.ac.id Internet Source	<1 %
124	filsafatindonesia1001.wordpress.com Internet Source	<1 %
125	doczz.net Internet Source	<1 %

Exclude quotes On

Exclude matches Off

Exclude bibliography On

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'H. M. R.', with a large, stylized initial 'H'.

Raynor Argaditya

GRADEMARK REPORT

FINAL GRADE

/0

GENERAL COMMENTS

Instructor

PAGE 1

PAGE 2

PAGE 3

PAGE 4

PAGE 5

PAGE 6

PAGE 7

PAGE 8

PAGE 9

PAGE 10

PAGE 11

PAGE 12

PAGE 13

PAGE 14

PAGE 15

PAGE 16

PAGE 17

PAGE 18

PAGE 19

PAGE 20

PAGE 21

PAGE 22

PAGE 23

PAGE 24

PAGE 25

PAGE 26

PAGE 27

PAGE 28

PAGE 29

PAGE 30

PAGE 31

PAGE 32

PAGE 33

PAGE 34

PAGE 35

PAGE 36

PAGE 37

PAGE 38

PAGE 39

PAGE 40

PAGE 41

PAGE 42

PAGE 43

PAGE 44

PAGE 45

PAGE 46

PAGE 47

PAGE 48

PAGE 49

PAGE 50

PAGE 51

PAGE 52

PAGE 53

PAGE 54

PAGE 55

PAGE 56

PAGE 57

PAGE 58

PAGE 59

PAGE 60

PAGE 61

PAGE 62

PAGE 63

PAGE 64

PAGE 65

PAGE 66

PAGE 67

PAGE 68

PAGE 69

PAGE 70

PAGE 71

PAGE 72

PAGE 73

PAGE 74

PAGE 75

PAGE 76

PAGE 77

PAGE 78

PAGE 79

PAGE 80

PAGE 81

PAGE 82

PAGE 83

PAGE 84

PAGE 85

PAGE 86

PAGE 87

PAGE 88

PAGE 89

PAGE 90

PAGE 91

PAGE 92

PAGE 93

PAGE 94

PAGE 95

PAGE 96

PAGE 97

PAGE 98

PAGE 99

PAGE 100

PAGE 101

PAGE 102

PAGE 103

PAGE 104

PAGE 105

PAGE 106

PAGE 107

PAGE 108

PAGE 109

PAGE 110

PAGE 111

PAGE 112

PAGE 113

PAGE 114
